



Laporan Kinerja Tahun 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Luwu Timur dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini cakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2025 - 2029.

Kami melaporkan pengukuran kinerja Tahun 2025 dari 6 program yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur Telah mencapai 95,30 dengan **Predikat Baik**, dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Kedepan,Kami akan melakukan Berbagi perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Malili, 31 Januari 2026

PI. KEPALA DPM-PTSP,



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690126 199803 1 004

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Kondisi Pegawai	5
1.5 Sistematika Penyajian	7
1.6 Isu-isu strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
2.1 Rencana Strategis	12
a. Tujuan dan sasaran	14
b. Indikator Kinerja Utama	15
2.2 Alokasi Anggaran	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan (good governance), diharapkan adanya transparasi dalam pengelolaan keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan instruksi priseden republic Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini wajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan ini disusun dengan pedoman pada peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur pemerintah Kabupaten luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terletak dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

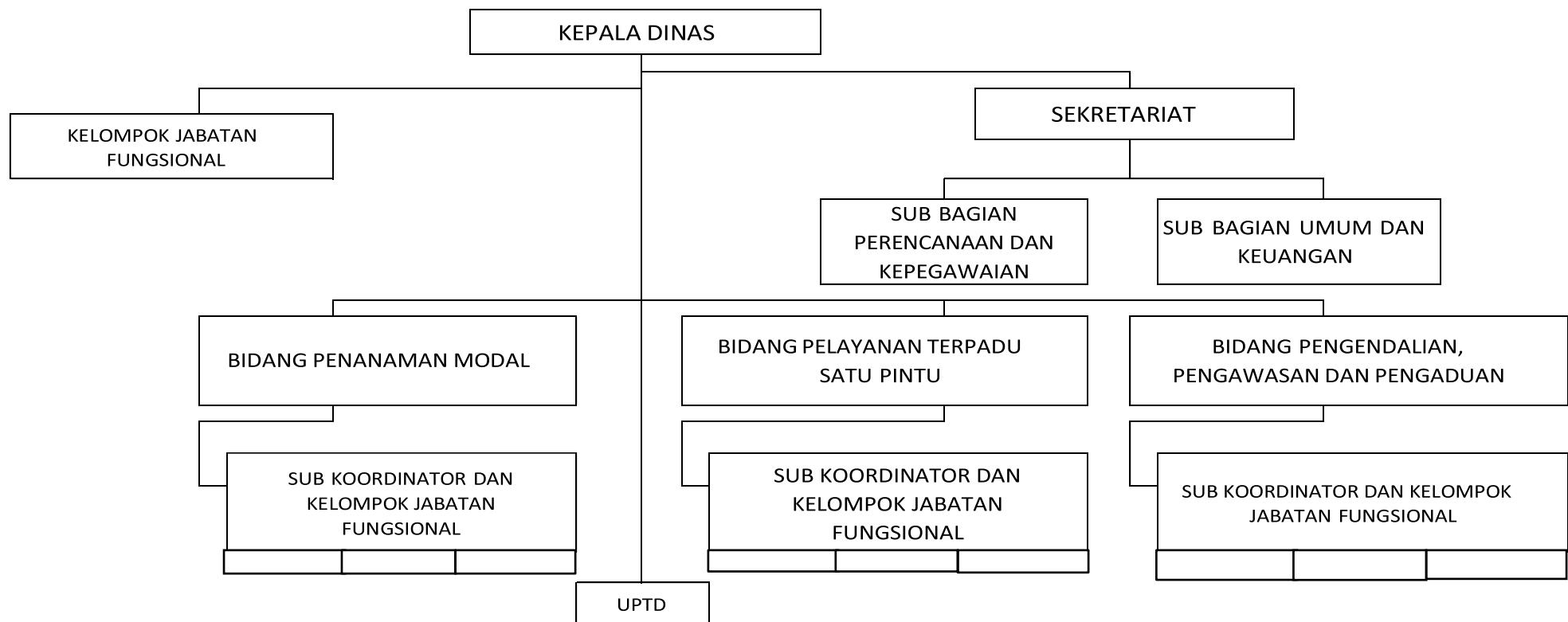
Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 bulan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian rencana Aksi Tahun 2024 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



1.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan PERDA tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah,

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II) dan terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4 Isu Strategis :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya 1 sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Tercapainya transformasi struktur perekonomian daerah (S5). Namun dalam pelaksanaan Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya Promosi Potensi Investasi Daerah;
2. Belum sempurnanya Regulasi daerah dalam perbaikan Iklim Investasi;
3. Belum tersedianya data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Informasi secara terpadu;

1.5 Keadaan Pegawai :

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab LuwuTimur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 19 Orang
- P3K : 1 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 22 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	IV	3	2	1	1										4	3
2	III	1	1	1	6			2	1						4	8
3	II														0	0
4	CPNSD			2	13										2	13
5	PPPK			2	7			1	5						3	12
6	Honorer														0	0
7	Upah Jasa				1			2			1	1	1	1	3	3
Total		4	3	6	28	-	-	5	6	-	1	1	1	16	39	

Tabel. 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	II-a	1													1	-
2	II-b														-	-
3	III-a		1												-	1
4	III-b														-	-
5	IV-a				1										-	1
6	IV-b														-	-
	Jumlah	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

Tabel. 1.3

Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2												2	-
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	1	2									2	3
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama			1	1									1	1
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			1	1	1								1	2
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda					1								-	1
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama					6								-	6
6	Penata Perizinan Ahli Pertama			1	3									1	3
7	Perencana Ahli Pertama			1	1									1	1
8	Arsiparis Ahli Pertama				2									-	2
	Jumlah	3	2	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan pelayanan public yang transparan, cepat, objektif dan professional serta meningkatnya persaingan inovasi pelayanan .
2. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, Inovasi, Peraturan baru dan Sistem Informasi Pelayanan.
3. Perlunya promosi keunggulan Kompetitif dan potensi peluang investasi guna menarik calon investor.
4. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha.
5. Perlunya memelihara Pelaku Usaha yang sudah ada, mengetahui permasalahan pelaku usaha dan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
6. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usahanya.
7. Perlunya penyelesaian aduan secara cepat dan proporsional.
8. Perlunya Pelaku Usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2025 – 2029 mengacu kepada RPJMD 2025 - 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Misi Ke-2 RPJMD :

“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”

Misi Ke-5 RPJMD :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih melalui Transformasi Digital ”

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan ;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025 - 2029

NO	TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL 2024		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	-17,32	1,28	1,48	1,75	2,12	2,21	2,21
	Sasaran 1: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Capaian realisasi Penanaman modal	3,3 T	3,3 T	3,35 T	3,4T	3,45T	3,5 T	3,5T
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87.86	87.86	87.95	88.00	88.20	88.40	88.70
	Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	62,25 (B)	70,10 (BB)	70,30 (BB)	70,50 (BB)	70,80 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)

Laporan Kinerja | 2025

TABEL 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025 - 2029**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Capaian realisasi Penanaman modal	Triliun	3,30 T	3,30 T	3,35 T	3,40 T	3,45 T	3,50 T
	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun	2,60 T	2,60 T	2,65 T	2,65 T	2,70 T	2,70 T
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Milyar	700 M	700 M	700 M	750 M	750 M	800 M
2.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	87.86	87.86	87.95	88.00	88.20	88.40

2.2 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 6 program, 14 Kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 3.063.934.883, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.804.186.615,- dan Belanja Modal Rp 41.000.000,-. Penetapan out put dan out come ada pada masing-masing kegiatan.

Adapun anggaran per program untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Program dan Pagu Anggaran DPMP TSP Kab. Luwu Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8	24	15.127.362.463
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	2	62.126.600
3	Promosi Penanaman Modal	1	2	101.406.100
4	Pelayanan Penanaman Modal	1	2	253.960.250
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	3	197.955.400
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	17.258.000
Total				15.760.068.813

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indicator utama/ sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain Adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

**Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah (S1)	Capaian realisasi Penanaman modal	3.300.000 (Juta Rupiah)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (S2)	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,86
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S3)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10 (BB)

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2025. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

**Tabel.2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah (S1)	Capaian realisasi Penanaman modal	3.300.000 (Juta Rupiah)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (S2)	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,86
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S3)	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10 (BB)
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
I.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	90 %
II.	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	100%
b.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	95 %
2	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	75 %
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 %
d.	Sekretariat		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi standar	Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,00%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedia nya dokumen perencanaan penanaman modal	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100%
2.	Tersedia nya peta potensi	Persentase Jenis potensi	100 %

	investasi Daerah	investasi yang tersusun	
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	3 MoU
b.	Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
1.	Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP di bidang penanaman modal	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	75%
c.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
1.	Tersedia nya laporan LKPM Pelaku Usaha	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambaran yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	90%
d.	Sekretariat		
1.	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah (Persen)	100%
2.	Terkelolanya anggaran secara efektif	Persentase realisasi anggaran (persen)	100%
3.	Terwujudnya tertib administrasi aset	Persentase aset teradministrasi (Persen)	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%
6.	Terwujudnya layanan administrasi tepat waktu (Persen)	Persentase layanan administrasi tepat waktu (Persen)	100%
7.	Tersedianya barang milik daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.	Jumlah barang yang berhasil diadakan sesuai dengan kebutuhan	100%
8.	Terwujudnya penyediaan jasa sesuai kebutuhan operasional	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%
9.	Terwujudnya pemeliharaan aset terawat baik	Persentase barang dipelihara secara berkala (Persen)	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi PM	2 Dokumen

	Kemudahan Penanaman Modal	yang tersedia	
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu		
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnya	6.000 Izin 3.000 Izin
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Konsultasi pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti	25 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244 Pelaku Usaha
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15 Kegiatan
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen
5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkhan	12 Dokumen
7.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang

8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
9.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
10.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
12.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
13.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exampler
14.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang
15.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	350 Kali
16.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
17.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	1000 Surat
19.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening
20.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
21.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	9 Unit
22.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
23.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
24.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	20 Orang
25.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

2.4 Rencana Anggaran DMPTSP Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) tanggal 16 Oktober 2024; Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33) tanggal 16 Oktober 2023. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp 5.909.121.498 dengan alokasi belanja sebagai berikut:

Tabel 9.

Program Utama DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	% (ANGGARAN TOTAL BELANJA LANGSUNG)
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	62.126.600	0,39
			Promosi Penanaman Modal		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	197.955.400	1,25
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	4.	Pelayanan Penanaman Modal	4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	253.960.250	1,60

Laporan Kinerja | 2025

	5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	5.	Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.258.000	0,10
--	----	---	----	---	------------	------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD, Rencana Aksi Kinerja maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal dan PTSP itu sendiri sebagai fungsi actuating kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET s.d Tw.4	REALISASI s.d Tw.4	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Capaian realisasi Penanaman modal	3,300 Triliun	4,219 Triliun	127,85 %	●
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	87,86	88,86	101,14 %	●
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,00	96,00	100	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ○ Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Ket
Terciptanya Iklim Investasi yang Konduatif di Daerah	a. Capaian realisasi Penanaman modal	Juta Rupiah	3.300.000	4.219.139	127,85	●
	1. Nilai Investasi Modal Asing (PMA)	Juta Rupiah	2.600.000	3.392.652	130,46	●
	2. Nilai Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	700.000	826.487	118,06	●

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) s.d Tw.4 Tahun 2025

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 127,85% atau sebesar Rp 4.219.139.934.687,- dari target sebesar Rp 3.300.000.000.000,-

Adapun Target Realisasi Investasi Tahun Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 – 2025

No	Jenis Investasi	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PMA	1.600.000.000.000	2.533.723.079.342	158,31	2.600.000.000.000	3.392.652.844.377	130,46
2	PMDN	700.000.000.000	793.614.560.714	113,28	700.000.000.000	826.487.090.310	118,06
	T O T A L	2.300.000.000.000	3.327.337.640.056	144,67	3.300.000.000.000	4.219.139.934.687	127,85

Dengan Rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah Investasi n} - \text{jumlah investasi tahun n-1})}{\text{Jumlah Investasi Tahun n-1}} \times 100\% \\ \frac{(\text{Rp } 4.219.139.934.687 - \text{Rp } 3.327.337.640.056)}{\text{Rp } 3.327.337.640.056} \times 100\% \\ = 26,80\%$$

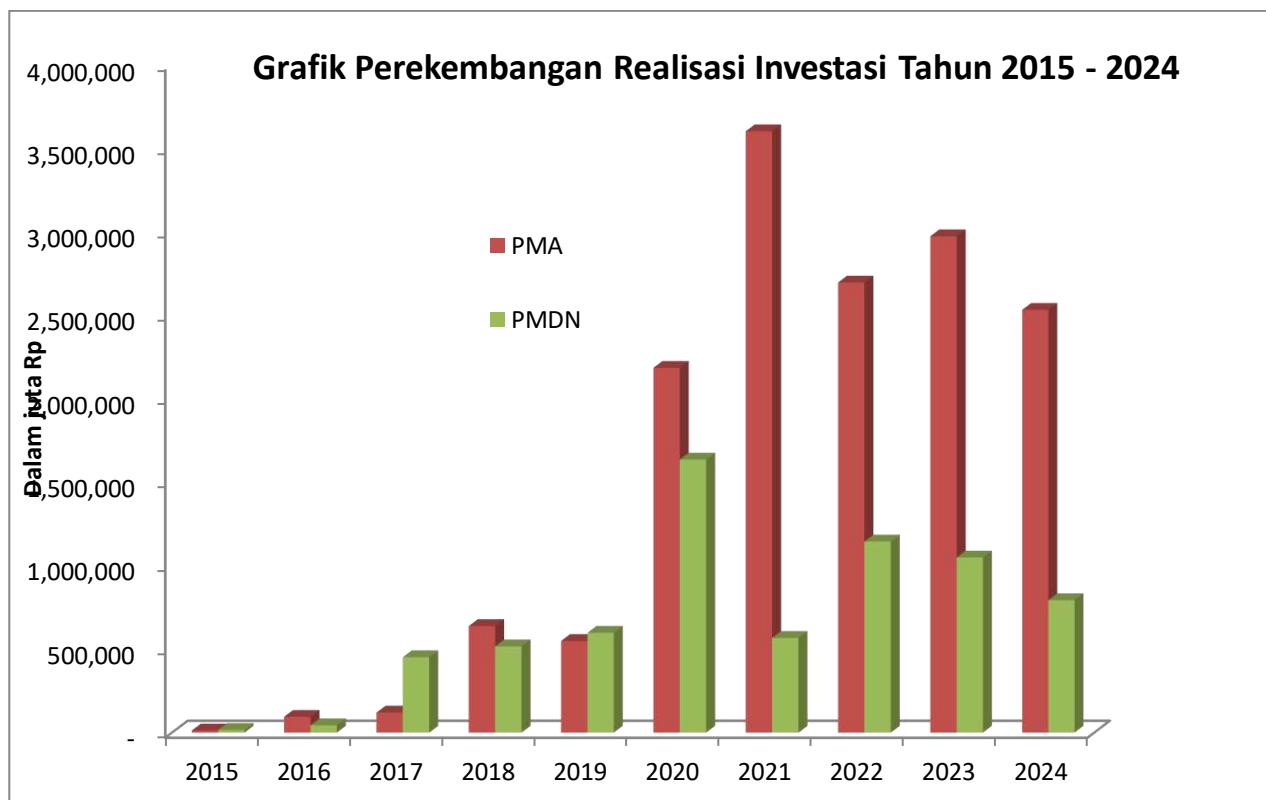
Dalam realisasi investasi itu, berhasil menyerap 13.573 orang tenaga kerja. Yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 13.461 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 112 orang. Berdasarkan sector, realisasi investasi selama tahun 2025, yakni pertambangan; Listrik, Gas dan Air; Transportasi, gudang dan telekomunikasi; Makanan: dan Jasa Lainnya.

Target Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp 2,3 Triliun dan pada Tahun 2025 sebesar Rp 3,3 Triliun atau berkurang sebesar Rp 1,0 Triliun.

Capaian Realisasi investasi pada Tw.4 Tahun 2024 dari target 2.300.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.327.337.640.056 atau 144,67 % sedangkan Tw.4 Tahun 2025 dari target 3.300.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 4.219.139.934.687 atau 127,85 %. Realisasi investasi dari Tahun 2024 dibandingkan dengan Tw.4 Tahun 2025 mengalami penurunan pencapaian sebesar 16,82 %, tetapi capaian realisasi tahun 2025 melebihi realisasi tahun 2024 sebesar Rp 891.802.294.631,-.

Tabel. 3.4
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018 – 2025
(Rp. 000.000,-)

NO	INVESTASI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PMA	639.033	549.259	2.185.879	3.604.254	2.947.236	2.974.791	2.533.732	3.392.652
2	PMDN	516.916	598.559	1.636.201	567.486	1.144.862	1.049.645	793.614	826.487

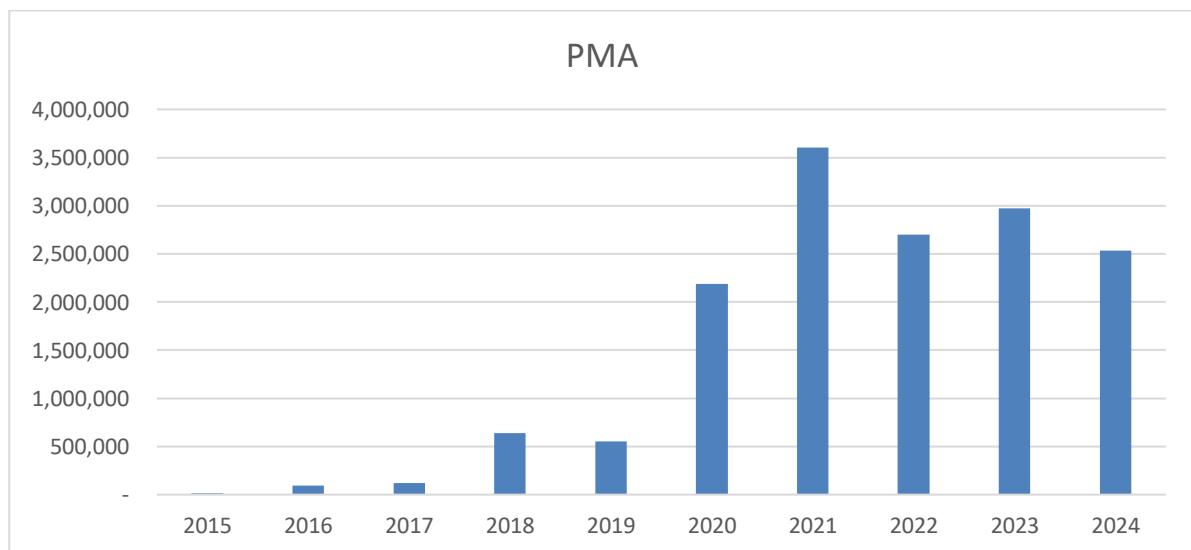


Indikator Kinerja 1.

Nilai Investasi PMA

Diagram. 2

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 1 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2016 s.d 2024



Penanaman Modal Asing (PMA)

Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang pertama yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Asing (PMA) pada Tahun 2025 dengan target Rp 2.600.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 3.392.652.844.377,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Asing pada tahun 2025 dengan target Investasi Modal Asing pada tahun 2025 dikalikan 100%. Capaian realisasi PMA sebesar 130,48%. Untuk melihat lebih jelas pengukuran indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Investasi Modal Asing (PMA) pada Tahun 2025

NO	Nama Perusahaan PMA	Realisasi LKPM (\$)	Realisasi LKPM (Rp) Asumsi 1 \$ = Rp 16.600
1	PT. MOBILKOM TELEKOMINDO	482.856	8.015.411.743
2	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	364.128	6.044.529.656
3	PT. BATU LATIMOJONG SULAWESI	30.120	500.000.000
4	PT. VALE INDONESIA	196.979.067	3.269.852.516.962
5	PT. INDONESIA HUALI INDUSTRY PARK	3.047.800	50.593.474.093
6	PT. MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA	92.471	1.535.025.127
7	PT. HUALI NICKEL INDONESIA	3.377.323	56.063.554.796
8	PT. UMRALAKSANA UTAMA	-	-
9	PT. HUAMEI NICKEL INDONESIA	2.912	48.332.000
11	PT. NUHA UNGGUL SEJAHTERA ABADI	-	-
12	PT. XLSMART TELECOM SEJAHTERA	-	-
TOTAL PMA		204.376.677	3.392.652.844.377

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 (nilai tukar Kurs 1\$ = Rp 16.600 bulan Desember 2025)

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak

menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

Tabel 3.6

**Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2025**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	0	-	0	Rp. 268.605.000.000
2017	21	-	21	Rp. 120.117.000.000
2018	34	-	34	Rp. 603.035.000.000
2019	13	-	13	Rp. 549.259.000.000
2020	8		8	Rp. 2.185.879.000.000
2021	8	8.003.575.455.108	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	183.367.444.000	10	Rp.2.947.236.398.569
2023	20	31.794.525.771.500	12	Rp.2.974.791.374.751
2024			10	Rp.2.533.723.079.342
2025	2	14.336.018.000.000	14	Rp. 3.392.652.844.377

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilihat perbandingan hasil realisasi kinerja dengan Tahun sebelumnya.

Indikator nilai investasi PMA pada Tahun sebelumnya (Tahun 2024) yang diperoleh sebesar Rp 2.533.723.079.342,- dengan target sebesar Rp 1.600.000.000.000 tercapai sebesar 158,30% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi pada Tahun 2025 yang diperoleh sebesar Rp 3.392.652.844.377,- dengan target sebesar Rp 2.600.000.000.000 tercapai sebesar 130,46%. maka terdapat peningkatan nilai realisasi investasi PMA sebesar Rp 891.802.294.631.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun (sebelumnya) 2024

Capaian Realisasi investasi pada Tahun 2024 dari target 1.600.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 2.533.723.079.342 atau 158,30% sedangkan Tahun 2025 dari target 2.600.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 3.392.652.844.377 atau 130,46%. Realisasi investasi dari Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 27,84 %.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2029

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2025 - 2029 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMA untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2029 adalah sebesar Rp.3.500.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMA sampai Tahun 2025 sebesar Rp. 3.392.652.844.377,- dibandingkan dengan target akhir Renstra , maka telah mencapai 96,91%.

Penurunan capaian kinerja investasi Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) , namun disertai peningkatan realisasi investasi, biasanya terjadi karena penetapan target kinerja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya secara nominal realisasiInvestasi naik, Penurunan persentase capaian kinerja investasi pada tahun berjalan meskipun nilai realisasi investasi meningkat dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya target kinerja yang ditetapkan secara signifikan. Selain itu, terdapat beberapa proyek investasi yang mengalami penundaan pelaksanaan akibat faktor teknis, regulasi, dan kondisi ekonomi, sehingga realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, secara nominal kinerja investasi tetap menunjukkan tren positif. Hal ini terjadi karena kenaikan target lebih besar daripada kenaikan realisasi. Factor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Target Kinerja Lebih Tinggi (Over-Targeting) Kebijakan Pemerintah, Adanya reformasi regulasi atau birokrasi yang masih dalam proses, sehingga investor lebih berhati-hati.
2. Penundaan atau Penyesuaian Proyek Investasi.
3. Kondisi ekonomi makro, terdampak dari factor eksternal (keputusan Investor) : Perlambatan ekonomi nasional/global, Fluktuasi harga komoditas, Inflasi dan suku bunga, Ketidakpastian pasar.
4. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Keberhasilan :

- a. Adanya komitmen dari semua aparatur, pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
- b. Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- c. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha.
- d. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha melalui aplikasi perizinan secara online (OSS RBA)
- e. Sudah diberlakukannya TTE (tanda tangan elektronik) penerbitan izin Non berusaha melalui Srikandi sehingga pemohon izin tidak perlu datang ke kantor
- f. Adanya sarana konsultasi, informasi dan pengaduan melalui surat langsung ke Perangkat Daerah, WA dan Kotak Pengaduan.

2. Faktor Peningkatan kinerja:

- a. Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan.
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, OPD Teknis dan Praktisi akademisi.
- c. Pelaksanaan pendampingan secara langsung yang dilaksanakan di kantor perusahaan bersangkutan.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA).
- e. Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan

Indikator Kinerja 2.

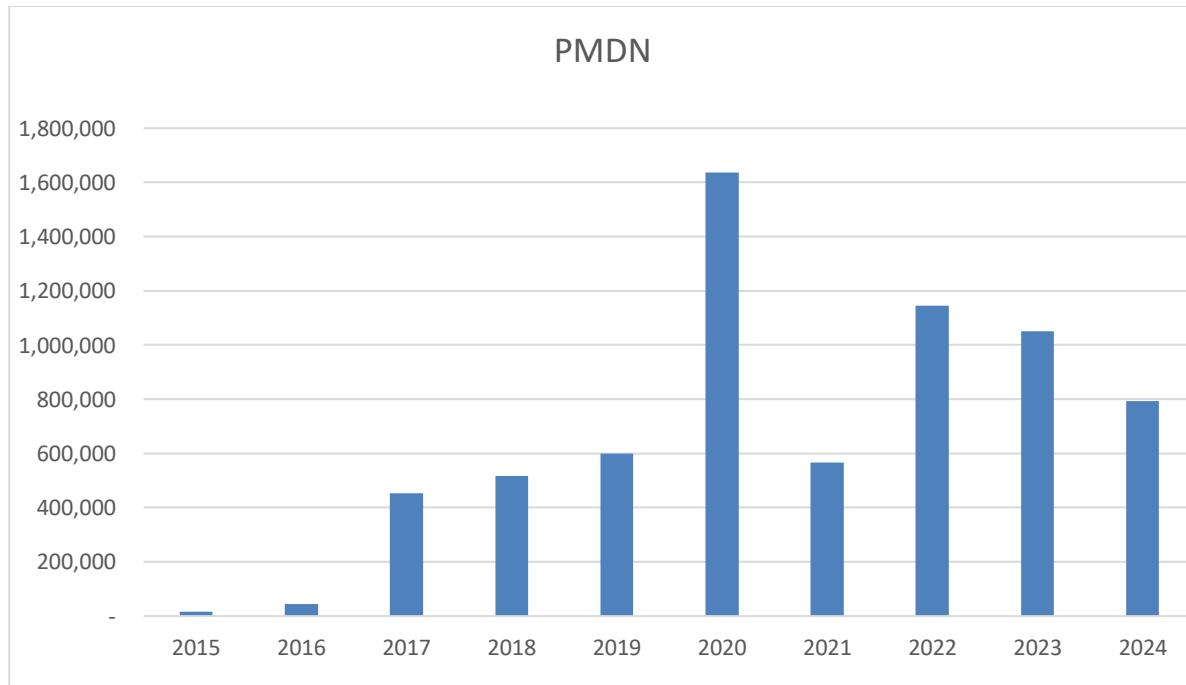
Nilai Investasi PMDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2024 dengan target 700.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 793.614.560.714 atau sebesar 113,28%. sedangkan pada Tahun 2025 dengan target 700.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 826.487.090.310 atau sebesar 130,46%. Untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun 2025 dibagi dengan target Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun 2024 tersebut dikalikan 100%.

Diagram. 3

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 2 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2024



Tabel. 3.7

Realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2025

NO	Nama Perusahaan PMDN	TOTAL
1	CV. ASIA TIMUR SENTOSA	-
2	CV. AF	50.000.000
3	CV. ALAMANDA UTAMA	-
4	CV. ARYANDS UTAMA CONSULTAN	-
5	CV. AZZAHRA	-
6	CV. BANUMBU KARYA	-
7	CV. BERKAH MALILI	177.000.000
8	CV. BINTANG MAHALONA PERKASA	-
9	CV. CAHAYA PATAGANNA	5.575.000.000
10	CV. DANISH PUTRA WOTU	-
11	CV. DEA CIPTA SARANA	79.000.000
12	CV. GLORY PROJECT	-
13	CV. HANIN KONSTRUKSI	-
14	CV. INDO MULIA KARYA	152.000.000
15	CV. INDO MULIA KARYA	-
16	CV. KARYA MADANI PRATAMA	-
17	CV. MAHESWARI LANDSKAP	-
18	CV. MATTIRO DECENG LUTIM	-
19	CV. PADOE PUTRA PRATAMA	-
20	CV. PUTRA BUNGSU SESA	750.000.000
21	CV. PUTRA BUNGSU SESA	-

22	CV. SARAMAI MANDIRI	-
23	CV. SARANA TIMUR	-
24	CV. SARANA TIMUR	-
25	CV. SARANA TIMUR ABADI	-
26	CV. SARANA TIMUR ABADI	-
27	CV. TIGA PUTRA LAKAWALI	-
28	CV. WATIK NAHNU BERLIAN	-
29	CV. ZEFANO ANUGERAH KURNIA	1.303.000.000
30	MUGHFIRA ANDI MATTOREANG	20.000.000
31	NURAINUN WIDYAZAYANAH. P	60.000.000
32	PT ANTAREJA MAHADA MAKMUR	-
33	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK	-
34	PT KARTIKA BINA MEDIKATAMA	-
35	PT MOJONG MITRA MAJU	-
36	PT NUSA KONSTRUKSI ENGINERING	-
37	PT NUSANTARA EKSPRES KILAT	-
38	PT PUTRA WASUPONDA MANDIRI	-
39	PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA	-
40	PT SUMBERDAYA SEWATAMA	-
41	PT WIRATMAN	-
42	PT. BUANA CIPTA KARSA	-
43	PT. ABE BAROKAH JAYA	-
44	PT. ABYSSAL BERITA LUTIM	-
45	PT. ALIMASI REYHAN MANDIRI	-

46	PT. AMAL SEHAT INDONESIA	-
47	PT. AQIEL RIFF MEDIA	-
48	PT. ARBA INSAN MULYA	-
49	PT. ARKORA HIDRO MALILI	-
50	PT. ASME KOMUNIKASI LUTIM	-
51	PT. ATHALAH KREASI MEDIA	-
52	PT. BERLIAN NUHA PERSADA	-
53	PT. BUMI BATARA RESOURCES	1.000.000.000
54	PT. BUMI MANDIRI PERKASA WASUPONDA	-
55	PT. BUMI SIKKUNG SULAWESI	-
56	PT. CAHAYA LUTIM INTERMEDIA	-
57	PT. CARLY ALFA TIMUR	-
58	PT. CENDRAWASIH KARYA CEMERLANG	-
59	PT. CYBER INTERMEDIA RAHMATQHAIREEN	-
60	PT. DAFFA SAPUTRA JAYA	-
61	PT. LATANINDO GRAHA PERSADA	100.000.000
62	PT. ABE BAROKAH JAYA	1.680.000.000
63	PT. ALD OCEAN NUSANTARA	-
64	PT. ALIF WAHANA PUTRA MANDIRI	-
65	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI	400.000
66	PT. ANDA HYDRO POWER	219.735.000
67	PT. ANEKA JASA SOROWAKO	24.133.465.319
68	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	4.147.500.000
69	PT. ANGKASA JASA MULIA	112.878.384
70	PT. ANOA HYDRO POWER	-
71	PT. ANUGERAH JAYA BUANA	2.461.323.163

72	PT. ARIF ABDULLAH PERDANA	5.200.000.000
73	PT. ARKORA HYDRO MALILI	219.952.320.839
74	PT. ARMADA TUNASJAYA ABADI	198.740.948
75	PT. ARSA RITRA PROPERTI	263.000.000
76	PT. ASTRA INTERNATIONAL	-
77	PT. ASULI JAYA GLOBALINDO	1.545.000.000
78	PT. BARUGA MAHKAM RESOURCES	120.000.000
79	PT. BATARA SAKTI BALAMBANO	-
80	PT. BUANA CIPTA KARSA	227.500.000
81	PT. BUJAYA KARYA MAKMUR	14.162.005.093
82	PT. BUJAYA KARYA MAKMUR	14.162.005.093
83	PT. BUMI BATARA BINTARI	40.000.000
84	PT. BUMI PERSADA TIMUR	68.000.000
85	PT. CEMERLANG MAKMUR ABADI	120.000.000
86	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	9.299.140.555
87	PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA	-
88	PT. DAYA INDAH ANDALAN	3.524.992.724
89	PT. DAYA INDAH YASA	21.672.216
90	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	-
91	PT. DELAPAN DELAPAN TOWUTI	5.763.300.011
92	PT. DELAPAN INTAN MUTIARA	150.000.000
93	PT. DWIQA SHARA SOLUSI	-
94	PT. EPID MENARA ASSETCO	10.500.000
95	PT. ERA MARPADOT	17.760.000
96	PT. GLOBAL ASISTENSI MEDIKA	-
97	PT. GLOBAL TEKNOLOGI INDOSERV	1.665.000.000

98	PT. HADJI KALLA	45.521.600
99	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	75.000.000
100	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	735.000.000
101	PT. HUSNUL MAJOR	750.000
102	PT. IMAI ALTRMEDIA CREATIVE	-
103	PT. INDIRA INDO PERKASA	724.000.000
104	PT. INDO MARCO PRISMATAMA	19.238.789.388
105	PT. INDOMARCO ADI PRIMA	-
106	PT. INDOTRUCK UTAMA	-
107	PT. INDRA PRATAMA WASUPONDA	2.497.885.000
108	PT. INTI ASET SULAWESI INDONESIA	1.944.000.000
109	PT. KARYA MINDO UTAMA	15.652.600.000
110	PT. KAWASAN INDUSTRI TERPADU LUWU TIMUR	17.897.588.196
111	PT. KELAPA GADING BERLIAN	198.200.000
112	PT. KEMBAR CIPTA RAYA	800.000.000
113	PT. KLANASIA CITRA MULYA	-
114	PT. LALOMERUI NUSA ENERGI	275.000.000
115	PT. LEKKANG MINERAL UTAMA	25.000.000
116	PT. LINGKE SULAWESI MINERAL	5.336.021.562
117	PT. LUWU ENERGI TIMUR SENTOSA	-
118	PT. MALILI MUARA ENERGI	-
119	PT. MEGAHPUTRA SEJAHTERA	-
120	PT. MIDI UTAMA INDONESIA	2.864.666.834
121	PT. MINJA GLOBAL MANDIRI	100.000.000
122	PT. NICKEL PRIMA UTAMA	-
123	PT. NISCALA LINIER INDONESIA	938.000.000

124	PT. NUHA UNGGUL SEJAHTERA ABADI	-
125	PT. PACIFIC GREEN PROPERTY	-
126	PT. PANCA DIGITAL SOLITION	1.227.436.643
127	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I	-
128	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	27.538.312.830
129	PT. PRIMA UTAMA LESTARI	37.322.631.733
130	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	-
131	PT. PUMA JAYA UTAMA	-
132	PT. PUPUK INDONESIA NIAGA	8.000.000
133	PT. PUTRA ALMAIDAH UTAMA	-
134	PT. PUTRA BUMI KARYA WASUPONDA	19.000.000
135	PT. PUTRA MAHALONA	60.000.000
136	PT. PUTRA MANDIRI PERKASA WASUPONDA	1.000.000
137	PT. PUTRA SEMBILAN NAGA	4.000.000
138	PT. RAJA JAYA PERKASA	-
139	PT. RAZQA GEMILANG REALTY	16.682.033.750
140	PT. RUSTIKA GLOBAL INDONESIA	1.000.000.000
141	PT. RUSTIKA GLOBAL INDONESIA	1.000.000.000
142	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	-
143	PT. SANROY MITRA SAUDARA	-
144	PT. SINAR SENTOSA UTAMA	155.000.000
145	PT. SOLU SINDO KREASI PRATAMA	635.104.706
146	PT. SOLUSI PELABUHAN LAMPIA	
147	PT. STAR MITRA SULAWESI	12.250.000
148	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	1.000.000
149	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	26.164.912.057

150	PT. SUMBER ENERGI MAPPATUO	5.200.000
151	PT. SUMBER RAHMAT PERTIW	2.458.061.944
152	PT. TANA TIMUR PROPERTI	3.326.000.000
153	PT. TEGUH WIRA PRATAMA	258.880.735.138
154	PT. TIZAR TIRZIA TRIZARDI	28.933.340.065
155	PT. TORASINA TEKNIK KONTRUKSI	2.780.000.000
156	PT. TOWER BERSAMA	5.715.942.354
157	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA	1.903.100.000
158	PT. TRAKINDO UTAMA	320.000.000
159	PT. UNITED TRACTORS	101.509.793
160	PT. USA RIZQ SENTOSA	25.000.000
161	PT. USU HYDRO POWER	-
162	PT. UWAIIS MANDIRI UTAMA	-
163	PT. WAHANA MULTI NIAGA	10.863.110.000
164	PT. WATIK NAHNU BERLIAN	5.000.000
165	PT. WIJA BARUGA HARAPAN	-
166	PT. YULIANA INTI PERSADA	6.167.147.372
167	SISKA APRILIYA	10.000.000
168	SUPRIONO	1.625.000.000
169	SYAMSU	3.050.000.000
170	TARUNA MANDIRI UTAMA	760.000.000
171	YAYA AGRICULTURE SULAWESI 2.	74.000.000
T O T A L PMDN		826.487.090.310

Table 3.8

Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur 2020 – 2025

No	Tahun	Uraian Jumlah Investor		Total
		PMDN	PMA	
1	2020	21	5	26
2	2021	41	5	46
3	2022	81	5	86
4	2023	146	7	153
5	2024	169	7	176
6	2025	171	12	183

Sumber : DPMPTSP Kab. Luwu Timur 2025

Pada tahun 2025, jumlah investor di Kabupaten Luwu Timur tercatat sebanyak 183 investor, yang merupakan capaian tertinggi selama periode 2020–2025. Jumlah tersebut terdiri dari 171 investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 12 investor Penanaman Modal Asing (PMA). Kondisi ini menunjukkan bahwa minat investasi di Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan, tidak hanya dari investor domestik tetapi juga dari investor asing. Peningkatan jumlah investor pada tahun 2025 mencerminkan semakin membaiknya iklim investasi serta kepercayaan investor terhadap potensi dan peluang usaha di Kabupaten Luwu Timur.

Table 3.9

Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2020-2025

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021		1.932.338.626.816	422	567.486.903.997
2022	1749	5.072.166.453.138	131	1.144.862.849.673
2023	9262	3.488.504.120.743	326	1.049.645.884.399
2024	5134	949.877.603.076	425	793.614.560.714
2025	3448	7.646.276.907.571	608	826.487.090.310

Sumber : DPMPTSP Kab. Luwu Timur 2025

Pada tahun 2025, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di

Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kinerja yang cukup positif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hingga tahun 2025, jumlah proyek PMDN yang memperoleh persetujuan tercatat sebanyak 3.448 proyek dengan nilai persetujuan investasi kumulatif sebesar Rp7.646.276.907.571. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim investasi serta potensi ekonomi daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun realisasi investasi PMDN hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 608 proyek dengan nilai realisasi kumulatif sebesar Rp826.487.090.310. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara nilai persetujuan dan realisasi investasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi antarperangkat daerah terkait, peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada investor, serta percepatan proses pelaksanaan proyek investasi, guna mengoptimalkan realisasi investasi yang telah disetujui dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel. 3.10
Jumlah Investasi PMDN
Kab. Luwu Timur Tahun 2017 - 2025**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41	1.932.338.626.816	422	567.486.903.997
2022	1749	5.072.166.453.138	131	1.114.862.849.673
2023	9262	3.488.504.120.743	72	1.049.645.884.399
2024	5134	949.877.603.076	425	793.614.560.714
2025	3448	7.646.276.907.571	608	826.487.090.310

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 yang diperoleh sebesar Rp. 793.614.560.714,- dengan Target sebesar Rp. 700.000.000.000,- maka tercapai sebesar 113,28 %. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi PMDN Tahun 2025 yang diperoleh

sebesar Rp. 826.487.090.310,- dengan Target sebesar Rp. 700.000.000.000,- maka tercapai sebesar 130,46 %.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja nilai investasi PMDN pada Tahun 2024, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 113,28 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 130,46 % maka terjadi peningkatan sebesar 17,18 point. Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami peningkatan pada Tahun 2025 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2024) disebabkan:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, erbaikan sistem pelayanan perizinan, baik melalui OSS-RBA maupun pelayanan langsung, telah mempercepat proses perizinan usaha. Kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk merealisasikan rencana investasinya.
- Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah, Adanya kebijakan daerah yang pro-investasi, seperti penyederhanaan regulasi, pemberian fasilitasi usaha, dan pendampingan investor, meningkatkan minat pelaku usaha lokal untuk melakukan ekspansi usaha.
- Stabilitas Kondisi Daerah, Kondisi keamanan, sosial, dan politik daerah yang relatif stabil menciptakan rasa aman bagi investor domestik dalam menjalankan usahanya.
- Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal, Pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah, seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa, mendorong peningkatan investasi oleh pelaku usaha lokal.
- Peningkatan Aktivitas UMKM dan Usaha Menengah, Bertumbuhnya UMKM dan usaha menengah yang naik kelas menjadi usaha formal turut meningkatkan nilai PMDN yang tercatat dan dilaporkan dalam sistem OSS dan LKPM.
- Kemudahan Akses Pembiayaan, Meningkatnya akses pelaku usaha terhadap permodalan melalui perbankan, koperasi, dan lembaga pembiayaan mendorong realisasi investasi baru maupun pengembangan usaha.
- Intensifikasi Pembinaan dan Pendampingan Investor, Pendampingan penyusunan LKPM, konsultasi perizinan, dan fasilitasi penyelesaian kendala usaha oleh DPMPTSP meningkatkan kepatuhan pelaporan dan percepatan realisasi investasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2029

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2025 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMDN untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2029 adalah sebesar Rp.800.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMDN Tahun 2025 sebesar Rp. 826.487.090.310,- dibandingkan dengan target akhir tahun, maka telah mencapai 103,25%.

Table 3.11

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah) Kab. Luwu Timur Tahun 2020 - 2025

No	Tahun	Indikator		
		Realisasi PMDN tahun evaluasi	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2020	1.636.201.132.539	483.500.000.000	328,19
2	2021	567.486.903.997	1.511.201.132.539	37.55.00
3	2022	1.144.862.849.673	132.514.000.000	331,98
4	2023	1.049.645.884.399	344.862.849.673	304,37
5	2024	793.614.560.714	199.645.884.399	397,51
6	2025	826.487.090.310	93.614.560.714	4,14

Sumber : DPMPTSP Kab. Luwu Timur 2025

Pada tahun 2025, **nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** di Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar **Rp826.487.090.310**, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan realisasi PMDN pada periode tahun 2024 dimana realisasi sebesar **Rp.793.614.560.714**.di tahun ini terjadi peningkatan sebesar **Rp.93.614.560.714** yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja realisasi investasi, khususnya pada proyek-proyek PMDN yang mulai berjalan dan terealisasi pada tahun 2025.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya fasilitasi investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis

(bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha, serta pendampingan secara mandiri dalam proses penyusunan dan pelaporan LKPM. Upaya ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kualitas pelaporan pelaku usaha, sehingga data realisasi investasi dapat tercatat secara lebih akurat dan tepat waktu.

Selain itu, pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendorong percepatan realisasi investasi. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha serta memberikan fasilitasi dan solusi yang diperlukan agar pelaksanaan proyek investasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Untuk Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN berbeda pada tahun sebelumnya karena metode perhitungan yang digunakan berbeda berdasarkan rekomendasi inspektorat Provinsi.

Tabel 3.12

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tenaga Kerja PMA/PMDN	Orang	7.251	19.123	20.688	13.339	12.885	13.573
2	Jumlah Perusahaan (PMA/PMDN)	Unit	26	46	86	153	176	183
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/Perusahaan (%)	278,9	455,3	240,3	87,1	73,2	74,1

Sumber : DPMPTSP Kab. Luwu Timur 2025

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi kenaikan serapan tenaga kerja oleh perusahaan PMA/PMDN sebesar 1,05%, yang mana hal tersebut sejalan dengan adanya peningkatan jumlah investasi PMA/PMDN di Kabupaten Luwu Timur. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi di Kab. Luwu Timur menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja baru. Dapat disimpulkan peningkatan investasi PMA/PMDN dan daya serap tenaga kerja memiliki hubungan sebab akibat yang bernilai positif. Kenaikan angka investasi menyebabkan terjadinya kenaikan daya serap tenaga kerja. Hal ini jelas terjadi karena adanya investasi baru baik yg berupa pendirian perusahaan baru ataupun investasi berupa perluasan bisnis akan membuat

perusahaan semakin membutuhkan tenaga tambahan dalam operasionalnya, sehingga lapangan kerja semakin terbuka.

- ❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yaitu :
 - A. **Program Pengembangan iklim Penanaman Modal** didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Subkegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Subkegiatan ini adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi UKM dengan Bank dan pihak-pihak pemberi pinjaman dan kemudahan pemberian modal.
 - B. **Program Promosi Penanaman Modal** didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
 - a. Subkegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal yang indikatornya yaitu jumlah media promosi Penanaman Modal. Jumlah media yang digunakan adalah media surat kabar yang digunakan untuk meliput pemberitaan Penanaman Modal. Pada tahun 2025 terealisasi 2 media.
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, indikator subkegiatan adalah jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, dari target 3 kegiatan pameran terealisasi hanya 2 kegiatan antara lain : Temu Saudagar di Malili, Pameran APKASI di JCC Jakarta, kegiatan Temu Bisnis yang direncanakan akan dilaksanakan di Surabaya Karena adanya Rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan ini batal dilaksanakan.
 - C. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sumber Pendanaan Dana Transfer Khusus DAK non Fisik , yang terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

- modal, dengan indicator kinerja adalah Kegiatan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tahun 2024 sebanyak 240 orang dan terealisasi 253 orang.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Pada Tahun 2024 target kinerja sebanyak 15 jenis bidang usaha dan terealisasi sebanyak 14 Bidang usaha.
 - c. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan target indikator Jumlah Kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahan nya sebanyak 9 kegiatan usaha dan terealisasi 100%.

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Nilai Realisasi investasi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran karena Rasionalisasi anggaran untuk pelaksanaan Temu Bisnis dengan para Investor di Surabaya dibatalkan.
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Luwu Timur data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan sehingga belum mencerminkan data investasi secara keseluruhan.
- Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan kepada pihak team TAPD dan Bappelitbangda untuk mengalokasikan dana yang lebih besar
- Meningkatkan pembinaan dan pemantauan kepada PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Luwu Timur, sehingga data investasi dan nilai investasi bisa lebih akurat.
- Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
- Melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penyesuaian dan perubahan anggaran pada sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Pemberian Fasilitas/incentif dan kemudahan Penanaman Modal . Perubahan terjadi pada Belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi Investasi dan peluang usaha di Daerah maka dapat terfasilitasi dengan adanya Media Koran, website, aplikasi LKPM, dokumen Peta potensi.
- Sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DPMPTSP tetap berupaya melakukan pelatihan dan Bimtek Pelayanan Perizinan untuk bekerja maksimal dalam penyebaran informasi. Sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sebanyak 55 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 15 orang CPNS, 15 orang PPPK, dan 6 orang Upah Jasa.

Tabel. 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	3,30 Triliun	4,21 Triliun	127,85 %	15.019.297.813	1.213.655.850,-	95,30 %

1. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2025

dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah						Target Tahun 2029	
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025				
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian		
Capaian realisasi Penanaman modal	3,327 Triliun	3,327 Triliun	3,327 Triliun	3,300 Triliun	4,219 Triliun	127,89 %	3,50 Triliun	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2024). Hal ini disebabkan karena adanya:

- a. Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan.
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, OPD Teknis dan Praktisi akademisi.
- c. Pelaksanaan pendampingan secara langsung yang dilaksanakan di kantor perusahaan bersangkutan.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA).
- e. Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan kesadaran pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam melaporkan realisasi kegiatannya dalam aplikasi LKPM, selain itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan jumlah investor dalam berusaha.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2029)

Berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2029 bisa dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai realisasi investasi setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Tahun 2025 dengan target Total Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Total Tahun 2029

Sasaran I :	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah		Target Akhir Tahun 2029	% Capaian s/d terhadap Target Akhir Tahun 2025		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					
	Pada Tw.4 Tahun 2024	Total realisasi sampai dengan tahun 2025				
Capaian realisasi Penanaman modal	3,327 Triliun	4,219 Triliun	3,50Triliun	120,54 %		

3. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel, periode Januari hingga September (Triwulan III) tahun 2025 mencapai Rp13,716 triliun. Angka ini mencerminkan pencapaian 82,57% dari target provinsi Sul-Sel sebesar Rp 16,61 Triliun. Rincian Capaian Tw 1 sebesar Rp 3,932 triliun, didominasi oleh sektor pertambangan; Tw 2 sebesar Rp Rp5,698 triliun dan Sektor andalan meliputi pertanian dan industri pengolahan. Berikut adalah rincian realisasi investasi Sulawesi Selatan tahun 2025: Total Januari - September 2025 (TW III): Mencapai Rp13,716 triliun, tumbuh signifikan dari tahun sebelumnya. Target: Capaian hingga September telah mencapai 82,57% dari target yang ditetapkan.

Sektor Unggulan: Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan Ekonomi: Ekonomi Sulsel tumbuh 5,01% pada triwulan III-2025, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 3,30%. Data ini menunjukkan peningkatan performa investasi yang kuat di Sulawesi Selatan, didorong oleh peningkatan iklim usaha. Serapan tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN mencapai 23.567 orang dengan rincian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 19.727 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 252 orang.

Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar masih dipegang pertambangan yang mencapai Rp 4.020.818.538.962. Selanjutnya sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 1,016 Triliun; sektor listrik, gas, dan air Rp 602 miliar; sektor perdagangan

dan reparasi Rp1,391 Triliun; dan sektor Transportasi Gudang dan Makanan Rp 1,356 Triliun.



Lima Kabupaten/Kota yang melaporkan realisasi investasi penanaman modalnya sampai pada Tw.3 Tahun 2025 ditempati Kota Makassar, Luwu Timur, Maros, Bulukumba dan Gowa.



Bila dibandingkan dengan capaian Realisasi Investasi Kabupaten Luwu Timur Rp 4,219 Triliun dengan Provinsi Sulawesi Selatan Rp 13,716 Triliun pada Tw.3 Tahun 2025 (**perhitungan menggunakan data realisasi per Tw.3 Tahun 2025 karena Provinsi Sulawesi Selatan Januari belum merilis realisasi untuk Tw.4 2025**) maka tercapai sebesar:

$$\begin{aligned} &= (4,219 \text{ Triliun} / 13,716 \text{ Triliun}) \times 100\% \\ &= 30,75 \% \end{aligned}$$



Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Tabel . 20

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 DPMPTSP Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	a. Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	indeks	87,86	88,86	101,14

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Rata-rata penyelesaian Perizinan} = \frac{\sum \text{izin yang terbit tepat waktu}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah total Berkas Masuk : 7.127 berkas
 Jumlah total izin terbit : 7.117 izin
 Jumlah izin terbit tepat waktu : 6.505 izin
 Jumlah izin terbit tidak tepat waktu : 612 izin
 Rata-rata penyelesaian izin = $(7.127 : 7.117) \times 100$
 = 91,27 %

Capaian kinerja program Pelayanan Penanaman Modal 91,27 % dari target 96%, tidak mencapai target hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan penerbitan beberapa izin dikarenakan keterlambatan rekomendasi dari tim teknis.

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan Survei Kepuasan masyarakat (SKM) dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kab. Luwu Timur menurut penilaian masyarakat.
2. Untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur sehingga mampu menciptakan iklim Usaha dan kemudahan berusaha yang kondusif di Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan metode Kuesioner manual yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif menyangkut dalam pembangunan. Olehnya itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 telah menetapkan kebijakan tentang

pedoman survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan public, pedoman itu dimaksudkan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP dan diharapkan memberikan kepastian masyarakat dalam menilai secara objektif dan continue terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan public di DPMPTSP.

Target tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur sebesar 87,86 atau kategori “baik”. Pada Tahun 2025 dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 88,86 atau mencapai 101,14 % dari target yang ditetapkan.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

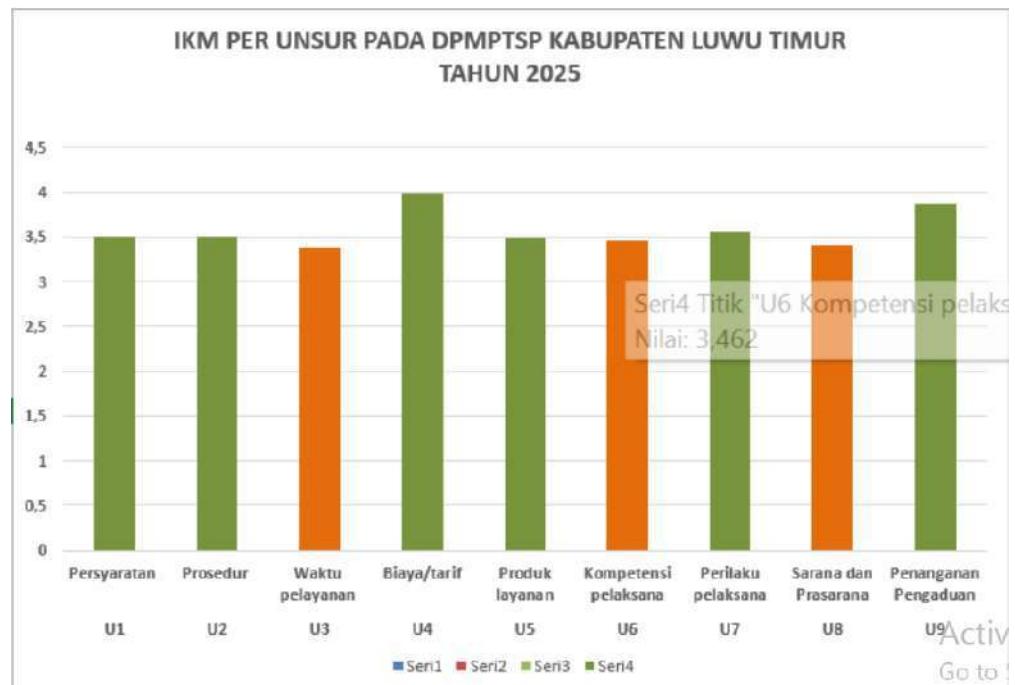
Tabel. 21

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Intervar Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuesioner tersebut terdapat 9 unsur pelayanan. Jumlah SKM pada Tahun 2025 **sebanyak 370 lembar kuesioner**. Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 14 Tahun 2017, jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan Survey Kepuasan Masyarakat 88,86 (Baik).



Tabel. 22

Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,505
U2	Prosedur Pelayanan	3,505
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,374
U4	Biaya/tarif	3,989
U5	Produk Layanan	3,495
U6	Kompetensi pelaksana	3,462
U7	Perilaku Pelaksana	3,560
U8	Sarana dan Prasarana	3,418
U9	Penanganan Pengaduan	3,868
NRR Unsur		= 32,175

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dihitung Nilai IKM Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NRR Tertimbang} &= \text{NRR Unsur} \times 1/9 \\
 &= 32,175 \times 1/9 \\
 &= 3,575
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{Total NRR Tertimbang} \times 25 \\
 &= 3,575 \times 25 \\
 &= \mathbf{89,38}
 \end{aligned}$$

Tabel. 23

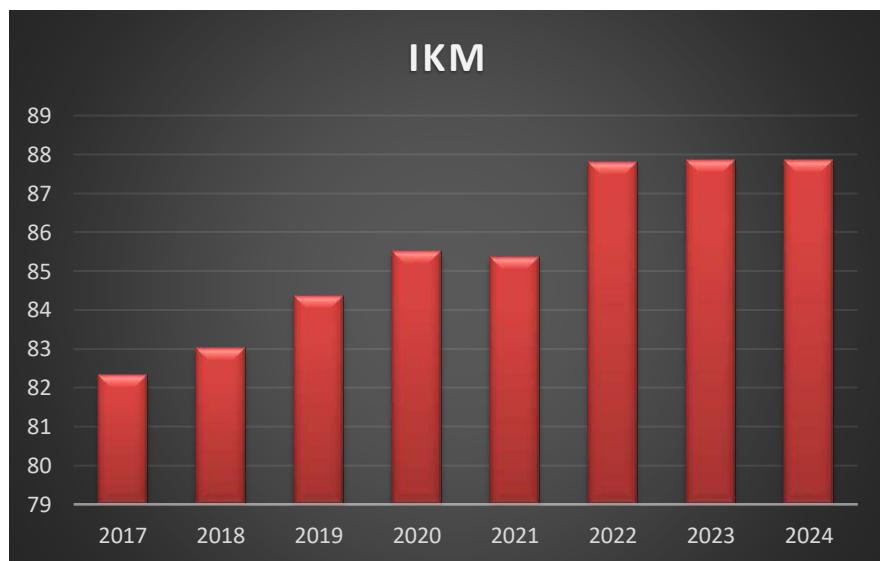
Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2020 - 2025

CAPAIAN IKM	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tahun 2020	85,01	85,51	100,59	●
Tahun 2021	85,01	85,37	100,42	●
Tahun 2022	85,20	87,80	103,05	●
Tahun 2023	85,30	87,84	102,97	●
Tahun 2024	85,40	87,86	102,88	●
Tahun 2025	87,86	89,38	101,73	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ○ Belum Mencapai Target

Diagram. 4

Percentase Capaian IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2024



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah Sangat Baik, dan **kepuasan masyarakat tertinggi** adalah dalam unsur **Biaya/Tarif**, karena Pemerintah sudah menggratiskan semua biaya pengurusan perizinan kecuali pada biaya

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IKM pada Tahun 2025 lebih tinggi dari pada Tahun 2025 disebabkan karena telah dilakukan tindak lanjut dan perbaikan ditahun 2025 atas hasil SKM Tahun 2024.

Nilai realisasi Izin mencapai 91,27 % disebabkan :

1. Adanya kemudahan Perizinan berbasis elektronik, sehingga pendaftaran bisa dilakukan oleh masyarakat umum atau pelaku usaha dimana saja dan kapan saja,
2. Tersedianya sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan perizinan,
3. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan trasnparan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,374. Selanjutnya Sarana Prasarana yang mendapatkan nilai 3,418 adalah nilai terendah kedua, serta kompetensi pelaksana yang mendapatkan nilai 3,462.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,989 dari unsur layanan, dan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,868, serta Perilaku Pelaksana yang mendapatkan nilai 3,560.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindaklanjut yaitu sebagai berikut :

- Penerbitan izin pada aplikasi OSS sangat lambat tidak sesuai dengan waktunya;
- Menurut saya Persyaratan Dokumen perizinan sebaiknya lebih dirampingkan lagi sehingga tidak banyak kelengkapan berkas/dokumen yang disiapkan; dan
- Pendingin ruangan dipelayanan Dpm-ptsp kurang baik.

Perbandingan Capaian Realisasi Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Sulsel cukup baik. Dilihat dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester I Tahun 2025 (Bulan Januari – Juni 2025) berada di angka **88,30**

No.	UNSUR PELAYANAN			Σ NRR/UNSUR	NRR/UNSUR	NRR/TTB/UN NSUR
U1	Persyaratan			1286	3,411	0,379
U2	Prosedur			1304	3,459	0,384
U3	Waktu pelayanan			1279	3,393	0,377
U4	Biaya/tarif			1476	3,915	0,435
U5	Produk layanan			1312	3,480	0,387
U6	Kompetensi pelaksana			1315	3,488	0,388
U7	Perilaku pelaksana			1315	3,488	0,388
U8	Sarana dan Prasarana			1294	3,432	0,381
U9	Penanganan Pengaduan			1403	3,721	0,413
U10	Transparansi Layanan			0	0,000	0,000
U11	Integritas Petugas Pelayanan			0	0,000	0,000

Kepala Dinas PMPTSP prov. Sulsel, menjelaskan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Oleh karena itu, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Seksi Pengaduan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sulsel bekerjasama melakukan survey Kepuasan Masyarakat dengan menggandeng CV.Globalindo ProNetwork yang merupakan unit usaha dari Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia.

"Survey ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat." Dalam survei

yang dilakukan, ada sejumlah variabel yang diukur. Antara lain, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan saran dan masukan hingga sarana dan prasarana.

"Secara umum, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Prov. Sulsel adalah baik.". Nilai SKM persyaratan pelayanan, menurut kadis DPMPTSP Prov. Sulsel, mendapatkan nilai **3,411**. Persyaratan pelayanan yang didapatkan, sesuai dengan yang diinformasikan, dan tergolong mudah. Sedangkan dimensi prosedur pelayanan, sesuai dengan prosedur yang diinformasikan sebelumnya, dan tergolong sederhana. SKM prosedur pelayanan mendapatkan nilai **3,459**.

"Survey juga menunjukkan bahwa untuk waktu pelayanan tergolong cepat, biaya pelayanan murah (nilai 3,915) , produk pelayanan yang diberikan bermutu tinggi. Selain itu, petugas pelayanan sangat tanggap dan cepat dalam melayani masyarakat (nilai 3,488)". Sekedar informasi, populasi survey ini merupakan masyarakat yang telah menerima layanan administrasi perizinan dan non perizinan pada kantor Dinas PMPTSP Sulsel dalam rentang waktu sejak Januari – Desember 2025. Data populasi yang dikumpulkan 370 orang.

Bila dibandingkan antara capaian realisasi IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dengan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan maka :

$$= (\text{IKM. Luwu Timur/ IKM. Prov Sul-Sel}) \times 100\%$$

$$= (89,38/ 88,30) \times 100\%$$

$$= 101,22 \%$$

Realisasi keuangan atas pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

No	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN S.D 31 DESEMBER (Rp)	REALISASI S.D 31 DESEMBER (Rp)	SELISIH (Rp)
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	241.304.050	241.304.050	225.556.284	15.747.766
2.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	13.162.200	13.162.200	10.740.714	2.421.486
Jumlah		254.466.250	254.466.250	236.296.998	18.169.252
Capaian Realisasi Keuangan				92,86%	

Realisasi Keuangan Program Pelayanan Penanaman Modal masih kurang maksimal khususnya untuk Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih ada beberapa SPJ yang masih sementara proses.

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2025**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	4	3	3	4	4	3	4	3	4	
2	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
6	3	4	3	4	3	3	4	3	3	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
8	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
9	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
10	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
11	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
12	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
13	3	3	4	4	3	3	4	4	4	
14	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
16	3	4	4	4	4	4	3	3	4	
17	3	3	3	4	3	3	4	4	3	
18	4	3	3	4	4	3	3	4	3	
19	4	4	3	4	3	3	3	4	3	
20	3	3	3	4	3	4	4	3	3	
21	4	4	3	4	3	4	3	4	3	
22	3	4	4	4	3	4	3	3	3	
23	3	3	3	4	3	4	3	4	3	
24	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
25	3	4	3	4	3	4	4	4	3	
26	4	4	3	4	3	3	4	3	4	
27	3	3	3	4	4	3	4	3	3	
28	3	4	3	4	3	3	4	4	3	
29	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
30	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
31	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
32	4	3	4	4	3	3	3	3	3	
33	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
34	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
36	4	3	3	4	3	4	3	4	3	
37	3	4	3	4	4	3	3	3	4	

38	3	4	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	3	4	3	4	3	3	3
40	4	3	3	4	3	3	4	3	4
41	4	3	4	4	3	3	4	3	3
42	4	4	3	4	3	4	4	4	4
43	4	4	4	4	3	4	3	4	4
44	4	4	4	4	4	3	3	3	4
45	4	4	3	4	3	4	3	4	3
46	4	3	3	4	3	4	3	3	4
47	4	3	4	4	3	4	3	4	3
48	3	4	4	4	4	4	3	3	3
49	3	3	4	4	3	3	3	4	3
50	4	3	4	4	3	3	3	3	4
51	4	4	3	4	3	3	4	4	3
52	3	3	4	4	3	3	3	3	4
53	4	3	4	4	3	3	4	3	4
54	4	4	3	4	3	3	4	4	4
55	4	4	4	4	3	4	3	3	4
56	3	3	3	4	4	4	4	4	4
57	4	4	3	4	4	4	3	3	3
58	3	4	3	4	4	3	3	3	4
59	4	3	3	4	4	3	3	3	3
60	3	3	3	4	4	3	4	3	3
61	3	4	4	4	4	4	3	4	4
62	4	3	4	4	4	4	4	4	3
63	4	4	3	4	4	4	3	4	4
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4
65	3	4	3	4	4	4	3	4	4
66	3	4	3	4	4	4	3	3	4
67	3	4	3	4	3	4	4	4	4
68	4	4	4	3	3	3	3	3	4
69	4	4	3	4	3	3	3	3	3
70	3	4	3	4	3	3	4	3	4
71	3	3	4	4	4	3	3	4	3
72	4	3	3	4	3	3	3	3	4
73	3	4	3	4	3	4	3	3	3
74	4	3	4	4	3	4	3	4	3
75	4	3	4	3	3	4	4	3	4
76	3	4	3	4	3	3	3	3	4
77	4	3	4	4	3	3	4	3	4
78	4	3	3	4	4	3	4	3	4
79	3	4	3	4	3	3	3	4	3
80	4	3	4	4	3	3	3	3	4
81	4	4	3	4	3	4	4	3	3
82	4	3	4	4	3	3	4	3	4
83	3	4	3	4	4	4	3	4	4

84	4	3	4	4	4	4	3	3	3
85	3	4	3	4	3	4	3	3	4
86	4	3	3	4	3	3	4	3	4
87	3	4	3	4	3	3	3	3	3
88	3	4	3	4	4	4	3	4	4
89	4	3	3	4	3	3	3	3	4
90	3	3	3	4	4	3	4	3	3
91	3	3	3	4	3	3	3	4	3
92	4	4	4	4	3	4	4	4	4
93	3	4	3	4	3	3	3	3	3
94	3	3	3	4	3	3	3	3	4
95	3	4	4	4	4	4	4	4	4
96	3	3	3	4	3	3	3	3	3
97	3	3	3	4	3	3	3	4	4
98	3	3	3	4	3	3	3	3	3
99	4	3	3	4	3	4	3	4	4
100	4	3	3	4	3	3	3	3	4
101	4	3	3	4	3	4	3	3	3
102	3	3	3	4	3	3	3	3	4
103	3	3	3	4	3	4	3	4	4
104	3	3	3	4	4	4	4	3	4
105	4	4	4	4	4	3	3	3	4
106	4	4	3	4	3	4	3	4	3
107	4	3	3	4	3	4	3	3	4
108	4	3	4	4	3	4	3	4	3
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	3	4	3	4	4	4	4	3	3
111	3	4	3	4	3	3	3	4	4
112	3	3	4	4	3	3	4	3	4
113	3	4	3	4	4	3	3	3	4
114	4	4	3	4	4	4	4	4	4
115	4	3	3	4	3	3	4	3	4
116	4	3	4	4	3	3	4	3	3
117	4	4	3	4	3	4	4	4	4
118	3	3	4	4	3	4	3	4	4
119	4	3	3	4	4	4	4	4	3
120	4	3	4	4	3	4	3	4	4
121	4	3	3	4	3	4	4	4	4
122	3	4	3	4	4	3	3	3	4
123	3	4	3	4	3	3	3	3	4
124	3	3	3	4	3	4	3	3	3
125	3	3	3	4	3	3	3	3	4
126	3	3	4	4	3	3	3	3	3
127	3	4	3	4	3	3	4	4	4
128	3	4	3	4	4	4	3	3	3

129	3	4	3	4	4	3	3	4	4
130	4	4	3	4	4	4	4	4	4
131	4	3	3	4	4	3	4	3	4
132	3	4	3	4	4	3	4	3	3
133	3	4	3	4	3	3	3	4	4
134	4	3	4	4	3	3	4	3	4
135	4	3	4	4	4	4	3	3	4
136	3	4	3	4	4	3	3	4	3
137	3	4	4	4	3	4	4	3	4
138	4	4	3	4	3	4	3	4	4
139	4	3	4	4	3	4	3	4	4
140	4	3	4	4	3	3	4	3	4
141	4	4	4	4	3	4	3	4	4
142	4	3	3	4	3	3	4	3	4
143	4	3	3	4	3	3	4	3	3
144	3	4	3	4	3	4	3	3	4
145	3	3	4	4	4	3	3	4	4
146	4	3	3	4	3	4	3	4	4
147	4	3	4	4	4	4	4	4	4
148	3	4	3	4	3	4	4	3	4
149	4	3	3	4	3	4	4	4	3
150	4	3	4	4	3	4	3	4	4
151	3	3	3	4	3	4	3	4	3
152	3	4	3	4	3	3	4	3	4
153	4	3	4	4	3	3	4	3	4
154	3	3	4	4	3	3	3	4	3
155	4	4	4	3	3	3	3	3	4
156	4	3	3	4	3	3	3	3	3
157	3	3	4	4	3	4	3	4	4
158	4	3	3	4	3	3	3	4	4
159	4	3	4	4	3	3	3	4	3
160	4	3	3	4	3	3	3	4	3
161	3	4	3	4	3	3	4	3	4
162	4	3	4	4	4	3	3	3	3
163	3	4	3	4	3	4	3	3	3
164	3	4	3	4	3	4	4	3	4
165	4	3	3	4	3	4	4	4	3
166	4	3	4	4	3	4	3	4	4
167	4	3	3	4	3	3	4	3	3
168	4	3	3	4	3	3	3	3	4
169	4	3	3	3	3	3	4	4	3
170	4	4	3	4	3	4	3	4	4
171	3	4	3	4	3	3	3	3	3
172	4	3	3	4	3	3	4	3	3
173	3	4	3	4	3	4	3	3	4
174	3	3	4	4	4	3	3	4	4

175	3	4	3	4	3	3	4	4	3
176	3	3	4	4	3	4	3	3	4
177	4	3	4	4	3	3	4	3	4
178	4	4	3	4	3	3	4	4	4
179	3	3	4	4	3	4	4	3	4
180	4	3	4	4	4	3	4	4	4
181	3	4	3	4	4	4	3	3	3
182	3	4	3	4	4	3	3	4	4
183	4	3	4	4	4	4	3	3	4
184	3	3	3	4	3	4	3	4	4
185	3	4	4	4	3	3	3	3	4
186	3	4	3	4	3	4	3	3	4
187	3	3	4	4	3	3	3	3	4
188	4	3	3	4	3	4	3	4	4
189	3	4	3	4	3	3	3	3	3
190	4	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	4	3	3	3	3	4
192	4	4	4	4	3	4	3	4	4
193	3	3	3	4	4	3	4	3	3
194	3	3	3	4	3	4	3	4	4
195	4	3	3	4	4	4	4	3	4
196	4	3	4	4	4	3	4	3	3
197	4	4	3	4	3	3	3	4	3
198	4	3	3	4	3	4	3	4	4
199	3	4	3	4	3	3	3	3	3
200	4	3	3	4	3	4	4	4	3
201	3	3	3	4	3	3	4	3	4
202	3	4	3	4	3	4	3	3	3
203	4	3	4	4	3	3	4	3	4
204	4	4	4	4	3	4	3	4	3
205	4	3	4	4	4	3	4	4	3
206	3	4	3	4	3	3	4	3	4
207	4	3	3	4	3	4	4	4	3
208	4	3	4	4	3	4	3	4	4
209	3	4	3	4	3	3	3	3	4
210	4	3	3	4	3	4	3	3	4
211	4	3	4	4	3	4	3	4	4
212	3	3	3	4	4	4	4	4	3
213	4	3	4	4	3	3	3	3	4
214	3	3	3	4	3	3	3	3	4
215	3	3	3	4	3	3	4	3	4
216	4	3	4	4	4	3	4	4	4
217	3	4	3	4	4	4	3	3	3
218	3	4	3	4	4	3	3	4	4
219	3	3	3	4	4	4	4	4	3

220	4	3	4	4	3	3	3	4	4
221	3	3	3	4	3	3	4	3	3
222	4	4	4	4	3	4	3	4	4
223	3	4	4	4	3	4	3	4	4
224	3	3	3	4	4	3	4	3	3
225	3	3	3	4	3	4	3	4	4
226	4	3	3	4	4	4	4	3	4
227	4	4	3	4	3	3	3	4	3
228	3	3	4	4	3	4	4	4	3
229	4	4	3	4	3	3	3	3	3
230	3	4	3	4	3	3	4	3	4
231	4	3	4	4	3	3	4	3	4
232	3	3	4	4	3	3	3	4	3
233	4	4	3	3	3	3	3	3	4
234	3	3	3	4	3	3	3	3	3
235	3	3	4	4	3	3	3	4	4
236	4	3	4	4	3	3	4	4	3
237	4	3	3	4	3	3	3	3	4
238	3	4	3	4	3	3	4	4	3
239	3	3	4	4	3	4	3	3	4
240	3	3	4	4	3	3	4	3	3
241	4	3	4	4	4	3	3	4	4
242	3	4	3	4	4	4	3	3	3
243	3	4	3	4	4	3	3	4	4
244	3	4	3	4	4	4	4	2	3
245	3	3	3	4	3	3	3	3	4
246	3	3	3	4	4	4	4	4	3
247	4	3	4	4	3	4	3	4	4
248	3	3	3	4	3	3	4	3	3
249	4	4	4	4	3	4	3	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4	3
251	4	4	3	4	3	3	3	4	3
252	3	3	4	4	3	4	4	4	4
253	4	4	3	4	3	3	3	3	4
254	3	3	4	4	3	4	3	4	4
255	4	3	4	4	3	3	4	3	4
256	4	3	4	4	4	4	3	3	4
257	3	4	3	4	4	3	3	4	3
258	3	4	4	4	3	4	4	3	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4	4
261	3	3	3	4	3	3	3	3	4
262	3	3	3	4	3	3	4	3	4
263	3	3	3	3	3	3	3	2	4
264	4	4	4	4	4	3	4	4	4
265	3	4	3	4	3	3	4	3	4

266	4	3	3	4	3	3	3	4	3
267	4	3	3	4	3	4	3	3	4
268	3	4	3	4	3	3	4	4	3
269	4	3	3	4	3	4	4	4	4
270	3	3	3	4	3	3	3	3	4
271	4	3	4	4	4	3	3	3	3
272	3	4	3	4	4	3	4	4	4
273	4	3	4	4	3	3	4	3	4
274	3	4	3	4	4	3	4	4	3
275	4	4	4	4	3	3	3	3	3
276	3	3	3	4	3	4	3	4	3
277	4	4	4	4	4	3	3	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	3	4	4	3	3	4	4	3
280	3	3	4	4	3	3	3	3	4
281	4	4	3	4	3	4	3	4	3
282	3	4	3	4	3	4	4	4	4
283	4	4	4	3	4	3	3	3	4
284	4	4	3	4	3	3	3	4	3
285	3	4	3	4	4	3	4	3	4
286	4	3	3	4	3	3	4	4	3
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	3	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	3	3	4	3	3	3	3	4
290	4	4	3	4	4	3	4	3	3
291	4	4	3	4	3	4	3	4	3
292	4	4	3	4	3	4	3	4	3
293	4	3	4	4	4	4	3	4	3
294	3	4	4	4	4	3	3	3	3
295	4	4	4	4	3	3	4	3	4
296	4	3	4	4	4	3	3	4	4
297	4	3	4	4	4	4	4	4	3
298	3	4	3	4	3	4	3	4	3
299	3	4	3	4	4	3	4	4	3
300	4	4	4	4	3	3	3	4	3
301	3	3	3	4	3	4	3	4	3
302	3	4	4	4	4	3	3	3	4
303	4	3	4	4	3	3	4	3	4
304	4	4	3	4	4	4	3	4	3
305	4	4	3	4	3	3	4	3	3
306	3	3	3	4	4	3	4	4	4
307	3	4	4	4	4	3	3	4	4
308	3	4	3	4	4	4	3	3	3
309	4	4	3	4	4	3	4	4	3
310	4	4	4	4	3	4	4	3	3

311	3	4	4	3	4	4	3	4	4
312	4	3	4	4	3	3	4	4	3
313	4	3	3	4	3	3	3	3	4
314	3	4	3	4	3	3	4	4	3
315	3	3	4	4	3	4	3	3	4
316	4	3	4	4	3	3	4	3	4
317	4	4	4	4	3	3	4	4	4
318	4	4	3	4	3	3	3	3	3
319	3	3	3	4	3	4	3	4	3
320	4	4	3	4	3	3	4	3	4
321	4	3	4	4	3	3	4	3	4
322	4	3	4	4	3	4	3	4	3
323	4	4	4	3	3	3	3	3	4
324	4	3	3	4	3	3	3	3	3
325	3	3	4	4	3	4	3	4	4
326	4	3	3	4	3	3	3	4	4
327	4	4	4	4	3	3	3	4	3
328	4	3	4	4	3	3	3	4	3
329	3	3	4	4	4	3	4	4	3
330	4	3	3	4	3	3	3	3	4
331	3	4	3	4	3	4	3	3	3
332	4	3	4	4	3	4	3	4	3
333	4	3	4	3	3	4	4	4	4
334	3	4	3	4	3	3	3	3	4
335	4	4	4	4	3	3	4	4	4
336	4	3	4	4	4	3	4	3	4
337	4	4	3	4	3	3	4	4	3
338	4	3	4	4	3	4	4	3	4
339	4	3	4	4	3	4	3	4	3
340	3	4	3	4	4	4	3	4	4
341	4	3	4	4	3	3	4	4	3
342	4	3	3	4	4	3	4	3	4
343	3	4	3	4	3	3	4	4	3
344	3	4	4	4	3	4	3	4	4
345	4	3	4	4	3	3	4	4	4
346	4	3	4	4	4	3	3	3	4
347	4	3	3	4	3	4	4	4	4
348	3	4	3	4	4	3	3	3	4
349	4	4	3	4	3	3	4	3	4
350	4	3	3	4	3	4	3	3	3
351	4	4	4	4	3	4	3	4	4
352	4	3	4	4	3	3	4	3	3
353	3	4	3	4	4	4	3	3	3
354	3	4	3	4	4	3	4	4	4
355	4	4	3	4	4	4	4	4	4
356	4	3	4	4	4	4	4	3	4

357	4	4	3	4	4	4	4	3	3
358	4	4	3	4	3	4	4	4	4
359	4	3	4	4	4	3	4	3	4
360	4	3	4	4	4	4	4	3	4
361	3	4	3	4	4	3	4	3	3
362	4	4	3	4	4	4	3	4	4
363	4	4	4	4	4	4	4	3	4
364	4	4	4	4	4	4	4	4	3
365	4	4	3	4	3	4	3	4	3
366	3	4	4	4	3	4	4	4	4
367	4	4	3	4	4	3	4	3	4
368	4	4	3	4	3	4	4	4	3
369	3	4	4	4	4	4	3	4	4
370	4	3	4	4	3	4	3	4	3
Σ Nilai /Unsur	1315	1278	1256	1470	1226	1272	1269	1286	1331
NRR / unsur	3,554	3,454	3,395	3,973	3,314	3,438	3,430	3,476	3,597
NRR tertbg/ unsur	0,395	0,384	0,377	0,441	0,368	0,382	0,381	0,386	0,400
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan									^{*)} ^{**) 3,575} 89,38

DAFTAR KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Tanggal	Nama	Jenis Konsultasi	Tindak Lanjut		Keterangan
1	04 Januari 2024	Arwin Tandi	Tata cara dan persyaratan rencana pembuatan izin untuk toko tani	1.	Melakukan penjelasan terkait persyaratan pembuatan NIB	
2	05 Januari 2024	UMKM Desa Kalosi	Proses Pengurusan PIRT Produk UMKM	1.	Menjelaskan tatacara dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan izin termasuk NIB	
3	12 Januari 2024	Andi Esse	Tata cara Pencabutan SIK	1.	Menjelaskan kelengkapan yang harus disiapkan dan membuat surat pencabutan SIK yang akan diteruskan ke Dinas Kesehatan	
4	23 Januari 2024	Denny	Proses penerbitan NIB	1.	Menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi dan melakukan penginputan dan penerbitan NIB	
5	30 Januari 2024	Ulfah	Konsultasi terkait NPWP	1.	Menjelaskan pentingnya NPPWP dalam proses penerbitan NIB	
6	12 Februari 2024	Rahma	Tata cara dan persyaratan rencana pembuatan PBG	1.	Melakukan penjelasan terkait persyaratan pembuatan PBG selanjutnya mengarahkan kepada Dinas PUPR selaku tim teknis.	
7	21 Februari 2024	Sudarmin	Proses pengurusan NIB toko	1,	Menjelaskan tatacara dan persyaratan yang arus dilengkapi dalam penerbitan izin termasuk NIB dan mengarahkan ke Kantor Pajak Pratama untuk mengurus NPWP	
8	28 Februari 2024	Taufik	Tata cara Penerbitan Izin Penelitian	1.	Menjelaskan kelengkapan yang harus disiapkan	
9	04 Maret 2024	Rudi	Tatacara pengurusan Indomaret	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan Indomaret	

				2.	Mengarahkan ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk konsultasi lebih lanjut.	
10	04 Maret 2024	Amin Madehang	Konsultasi terkait Sertifikat layak yang tidak terverifikasi di Aplikasi OSS	1.	Melakukan penjelasan terkait akun OSS tersebut, dimana untuk menverifikasi bukan kewenangan daerah melainkan kementerian.	
11	06 Maret 2024	Kementerian ATR BPN	Konsultasi terkait PKKPR Non Laut yang ada di Danau Matano	1.	Telah dilakukan pengecekan diwilayah tersebut yang ternyata tidak memiliki PKKPR tetapi telah melakukan pembangunan	
12	13 Maret 2024	Ferry	Konsultasi terkait NIB yang tidak bisa terbit setelah melakukan penambahan KBLI	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan NIB.	
				2	Melakukan persuratan ke kontak BKPM	
13	25 Maret 2024	Sultan	Proses pengurusan NIB Jasa Kontruksi, Pertanian dan Perkebunan	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan NIB.	
14	01 April 2024	dr. Fila	Proses pencabutan SIK	1.	Menjabarkan proses dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan	
				2.	Mengarahkan Ke Dinas Kesehatan selaku Tim Teknis setelah terbit permohonan pencabutan	
15	23 April 2024	Rully	Konsultasi terkait Tatacara penerbitan PBG	1	Melakukan penjelasan terkait penerbitan PBG.	
				2	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku Tim teknis	
16	02 Mei 2024	dr. Rahmawati	Proses penerbitan SIK Dokter	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan SIK	
17	07 Mei 2024	Suryadin (PT. PUL)	Pembangunan TPS Limbah B3	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan Limbah B3	
				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis	
18	22 Mei 2024	Arief	Penerbitan izin usaha	1.	Melakukan penjelasan terkait pengurusan NIB	
				2.	Menjelaskan terkait perbedaan penerbitan izin sekarang dengan yang sebelumnya.	
19	03 Juni 2024	Ayub	Proses penerbitan PBG Rumah Tinggal	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan PBG	

Laporan Kinerja | 2025

				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis	
20	06 Juni 2024	Nurul	Proses pendaftaran NIB atas nama perusahaan	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran NIB	
				2.	Melakukan pendaftaran NIB	
21	07 Juni 2024	Inti Sari	Proses penerbitan SIK Peraat di Klinik	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran SIK Perawat	
				2.	Mengarahkan agar melengkapi semua kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.	
22	20 Juni 2024	Hilman	Proses penerbitan PKWT	1.	Melakukan penjelasan terkait penerbitan PKWT	
				2.	Menjelaskan bahwa saat ini aplikasi sedang mengalami maintenance.	
23	03 Juli 2024		Penerbitan kembali SIK yang hilang	1	Melakukan penjelasan terkait SOP SIK	
				2.	Mengarahkan ke Dinas Kesehatan selaku tim teknis	
24	03 Juli 2024	Adhi	Konsultasi terkait berkas yang harus dilengkapi untuk prngurusan pencabutan SIPA	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pencabutan SIPA dengan melampirkan SIPA asli	
				2.	Mengarahkan ke Dinas Kesehatan selaku tim teknis	
25	10 Juli 2024	PT. Towuti Jaya Husada	Proses pendaftaran NIB yang mengalami kendala dalam pengisian kolom bagian kabupaten	1	Melakukan penjelasan terkait proses penerbitan NIB	
				2.	Menyampaikan bahwa sudah beberapa hari ini OSS sedang maintenance	
26	03 Agustus 2024		Terkait Kelengkapan berkas SIP Bidan apakah harus meminta surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara penerbitan SIP	
				2.	Mengarahkan untuk melengkapi berkas	
27	07 Agustus 2024	Werni	Konsultasi terkait pengurusan NIB	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara Penerbitan NIB	

					2.	Melakukan pembuatan NIB	
28	12 Agustus 2024	Ningning	Konsultasi terkait pengurusan SIK		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pengurusan SIK	
					2.	Mengarahkan untuk melengkapi berkas	
29	23 Agustus 2024	Hartono	Proses pengurusan PBG		1	Melakukan penjelasan terkait proses penerbitan PBG	
					2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku tim teknis PBG	
30	17 September 2024	Bumdesa Pelita Mandiri	Proses penerbitan NIB		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
					2.	Menantu melakukan pendaftaran NIB	
31	25 September 2024	PT. PANCA DIGITAL SOLUTION	Proses pendaftaran PKKPR		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pendaftaran PKKPR	
					2.	Membantu melakukan pendaftaran	
32	02 Oktober 2024	PT. Aime Trio Group	Proses menerbitkan KBLI 11051		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan KBLI	
					2.	Mengarahkan ke Dinas Koperindag selaku Tim Teknis	
33	07 Oktober 2024	Miftahul Reskyah	Terkait Kesalahan penulisan tempat kerja di SIK		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara pembuatan SIK, dimana DPMPTSP membuat SIK berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan	
					2.	Membantu mengkoordinasikan dengan Pihak Tim Teknis	
34	01 November 2024	ADIL	Proses penerbitan NIB Perusahaan		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
					2.	Membantu mendaftarkan	
35	04 November 2024	Junita	Proses penerbitan izin Penelitian		1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dalam pengurusan izin penelitian	
					2.	Membantu melakukan penerbitan izin	

Laporan Kinerja | 2025

36	21 November 2024	Nurlela	Terkait penerbitan NIB untuk usaha kelompok	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dan penerbitan NIB	
				2.	Membantu melakukan pendaftaran	
37	04 Desember 2024	Syamsiah	Proses penerbitan Izin Yayasan Sekolah	1	Menjelaskan terkait persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan izin	
				2.	Membantu melakukan pendaftaran NIB terlebih dahulu	
				3.	Mengarahkan ke Dinas Pendidikan selaku Tim Teknis.	
38	17 Desember 2024	Nurlian	Proses pembuatan PBG	1	Melakukan penjelasan terkait tatacara kelengkapan berkas dalam pengurusan PBG.	
				2.	Mengarahkan ke Dinas PUPR selaku Tim Teknis	

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS TRIWULAN IV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025

PROGRAM/ KEGIATAN						SUB KEGIATAN						KE T		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REAL ISASI	% CAPAIAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	%	TW I	25	20,00	80	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	100,00		
			TW II	50	45,00	90								
			TW III	75	75,00	100								
			TW IV	100	90,00	90								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahaan	%	TW I	25	25,00	100,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Dok	TW II	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00								
			TW III	25	25,00	100,00								
			TW IV	25	25,00	100,00								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	TW I	25	20,00	80,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Dok	TW II	3	3	100,00	
			TW II	25	20,00	80,00								
			TW III	25	20,00	80,00								

Laporan Kinerja | 2025

			TW IV	25	25,00	100			TW IV	3	3	100,00		
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org	TW I	3	0	0,00	
										TW II	4	3	75,00	
										TW III	4	2	50,00	
										TW IV	2	10	500,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	19,00	76,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	18	72,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25	25	100,00				TW IV	1	1	100,00	
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	TW I	1	0	0,00	
										TW II	2	0	0,00	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	0	0,00	
										TW I	1	1	100,00	

						TW II	1	1	100,00	
						TW III	1	1	100,00	
						TW IV	0	0	0,00	
						TW I	1	1	100,00	
						TW II	1	1	100,00	
						TW III	1	1	100,00	
						TW IV	0	0	0,00	
						TW I	15	15	100,00	
						TW II	15	15	100,00	
						TW III	15	15	100,00	
						TW IV	15	15	100,00	
						TW I	2	2	100,00	
						TW II	2	2	100,00	
						TW III	2	2	100,00	

Laporan Kinerja | 2025

								TW IV	2	2	100,00			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	TW I	60	35	58,33		
									TW II	90	52	57,78		
									TW III	80	35	43,75		
									TW IV	40	200	500,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00	
			TW II	2	2	100,00				TW II	0	0	0,00	
			TW III	19	0	0,00				TW III	0	0	0,00	
			TW IV	2	21	100,00				TW IV	14	14	100,00	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00		
									TW II	0	0	0,00		
									TW III	16	0	0,00		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau		TW IV	0	16	100,00		
									Unit	TW I	0	0	0,00	

				Lapangan	Lapangan yang Disediakan (Unit)		TW II	2	2	100,00				
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	TW III	0	0	0,00				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	TW IV	0	0	0,00				
							TW I	0	0	0,00				
							TW II	1	0	0,00				
							TW III	0	0	0,00				
							TW IV	0	1	100,00				
							TW I	0	0	0,00				
							TW II	0	0	0,00				
							TW III	0	0	0,00				
							TW IV	4	4	100,00				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	TW I	25	25	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25	100				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25	100				TW III	1	1	100,00	

Laporan Kinerja | 2025

			TW IV	25	25	100				TW IV	1	1	100,00	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	Laporan	TW I	3	3	100,00	
							TW II			3	3	100,00		
							TW III			3	3	100,00		
							TW IV			3	3	100,00		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	Org	TW I	5	5	100,00	
							TW II			5	5	100,00		
							TW III			5	5	100,00		
							TW IV			5	5	100,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	TW I	6	6	100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	TW I	2	2	100,00	
			TW II	13	9	69,23				TW II	1	1	100,00	
			TW III	26	12	46,15				TW III	6	0	0	
			TW IV	13	30	100				TW IV	1	7	100	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	TW I	5	4	80,00	

								TW II	10	8	80,00			
								TW III	20	12	60,00			
								TW IV	12	23	100,00			
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	TW I	0	0	0,00		
									TW II	1	0	0,00		
									TW III	0	0	0,00		
									TW IV	0	1	100,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	% 	TW I	25	25	100,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Org	TW I	20	20	100,00	
			TW II	25	25	100,00				TW II	20	20	100,00	
			TW III	25	25	100,00				TW III	20	20	100,00	
			TW IV	25	25	100,00				TW IV	48	48	100,00	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	4	3	75,00		
									TW II	4	5	125,00		
									TW III	4	4	100		

Laporan Kinerja | 2025

								TW IV	6	6	100		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	3	3	100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00
			TW II	5	5	100,00				TW II	1	1	100,00
			TW III	2	2	100,00				TW III	0	0	0
			TW IV	6	6	100,00				TW IV	0	0	0
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00
										TW II	1	1	100,00
										TW III	0	0	0
										TW IV	0	0	0
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	0
										TW II	0	0	0
										TW III	1	1	100,00
										TW IV	0	0	0
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang	Dok	TW I	2	2	100

1. Perbandingan kondisi Target Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2025

➤ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus**”.

Target Indikator sasaran penunjang pada TA. 2025 adalah 96% dan realisasi 98,90% dengan persentase capaian kinerja 103,02%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDr
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD untuk penatausahaan keuangan yang berpengaruh terdapat penyerapan anggaran
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Keterlambatan penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Adanya sistem belanja barang makan minum dan Alat tulis kantor menggunakan belanja e-katalog di ULP.
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Untuk segera melakukan penatausahaan keuangan bilamana aplikasi telah siap digunakan
- Untuk segera menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Tidak adanya tenaga ASN pada jabatan pelaksana yang dapat membantu pejabat struktural sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

➤ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	96%	100%	15.127.362.463	14.438.011.390	95,44%

Tabel. 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 %	95,44%	0,56 %

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 96,00% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95,44 %, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 0,56 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2025 dengan Tahun sebelumnya (2024)

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 31
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						Target Tahun 2024	
Indikator Kinerja Sasaran	TA. 2025			TA. 2024				
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 %	98,90 %	103,02 %	96 %	98,90 %	103,02 %	100%	

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan TA. 2024 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Capaian kinerja beberapa sub kegiatan melebihi dari target yang direncanakan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 - 2029)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					
	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2024				
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,90%	98,90%	100%	98,90%		

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 33
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target s.d Tahun 2024	Realisasi TW III	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	96%	98,90%	103,02%

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	87,50%	87,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	20 Org	20 Org	20 Org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/an/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%

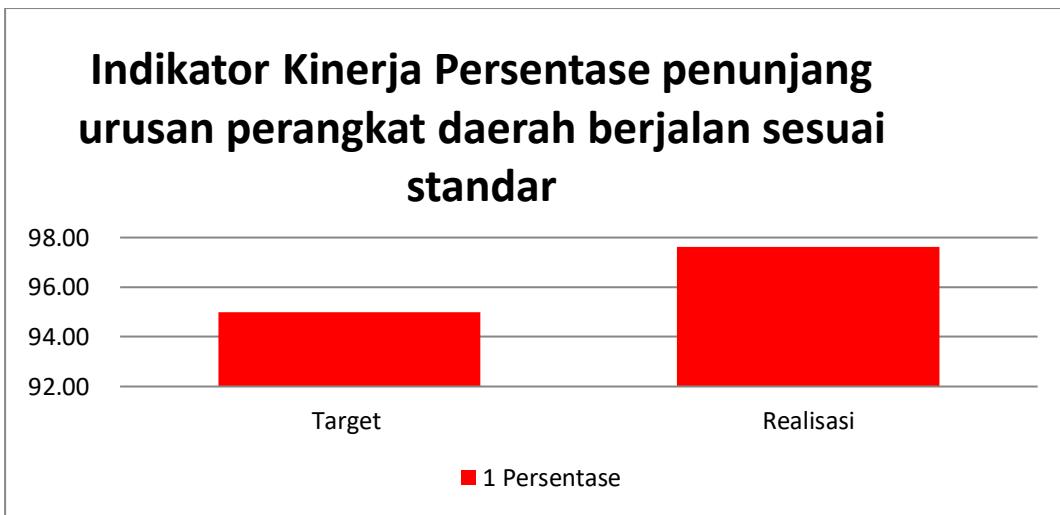
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	16 Org	17 Org	113,33%
b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Percentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	95,00%	95,00%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 Org	150 Org	130 Org	86,66%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	450 Kali	450 Kali	450 Kali	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%

		kebutuhan kantor	diadakan				
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,72%	94,72%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	1000 Surat	1297 Surat	198 Surat	129,7%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	60 Rek	60 Rek	60 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	4 Org	4 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	47 Unit	47 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

- ❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (outcome)

Grafik.
Perbandingan Target dan realisasi TA. 2025



Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 96% dan realisasi 98,90% dengan capaian kinerja 103,02%, dan menyerap anggaran sebesar 92,68%. Capain kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaianya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 96,4% dengan persentase capaian kinerja 95%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 90%, yang diakibatkan adanya jabatan Pelaksana (Pejabat Pemeriksa Keuangan) yang belum terisi. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 20 org dan realisasi 20 org dengan persentase capaian kinerja 100 %.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semensteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target pada TA. 2024 sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Keuangan Tahun 2024 2 dok, Laporan Triwulanan 4 dok, Laporan Bulanan Bendahara 12 dok.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target pada TA. 2024 sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.416.150, terealisasi sebesar Rp. 16.824.600 atau sebesar 96,60%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target pada TA. 2024 sebanyak 15 org dan realisasi 17 orang (113,33%) yaitu Bimtek anggaran 1 orang, Bimtek LKPJ/LPPD 1 orang, Bimtek Arsip 3 orang. Penggunaan anggaran BIMTEK disesuaikan undangan pemanggilan peserta. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.620.000, Realisasi keuangan sebesar Rp 17.620.000,- atau sebesar 98,30%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Target 100% dan realisasi 95,00% dengan persentase capaian kinerja 98,00%. Capaian kinerja kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 458.512.700,- terealisasi sebesar Rp 450.831.544,- atau sebesar 98,32%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.** Dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan dilkakukan pada TA. 2024. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.
- **Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.

- **Sub kegiatan Pengadaaan Peralatan dan Mesin** tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga belanja modal ditunda untuk direalisasikan.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target TA. 2024 sebanyak 1000 surat dan terealisasi 1.297 surat dengan persentase capaian kinerja 129%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target pada TA. 2024 sebanyak 60 rekening dan realisasi 60 rekening, terdiri dari Listrik DPMPTSP 12 rek, rek Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek, TV Kabel 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 4 orang setiap triwulan dan realisasi 4 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan tenaga security.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran

pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel. 34

Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELANJA	15.760.068.813	15.022.655.563,37	95,32
2	BELANJA OPERASI	4.791.108.313	4.405.158.394	91,94
3	Belanja Pegawai	3.133.129.793	2.888.420.650	92,19
	Belanja Barang dan Jasa	1.657.978.520	1.516.737.744	91,48
4	BELANJA MODAL	10.968.960.500	10.617.497.169,37	96,80
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.238.960.500	1.124.270.852	90,74
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.730.000.000	9.493.226.317	0,00

Anggaran APBD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar sebesar **Rp. 15.760.068.813,-** (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Enampuluh Milyar Enam Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Tiga Belas Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 3.133.129.793,-** belanja barang dan jasa **Rp. 1.657.978.520** dan belanja modal **Rp 10.968.960.500,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan serta 36 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 30. Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dan TA. 2023



Tabel. 34
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran			Permasalahan/ Kendala	Solusi		
		Pagu	Realisasi Anggaran					
			(Rp)	(%)				
1	2	3	4	5(9/8*100)	6	7		
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.127.362.463,00	14.438.011.390,00	133,02				
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.790.800,00	63.121.147,00	101,41		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.185.900,00	24.808.099,00	94,74				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.437.550,00	2.299.976,00	66,91				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.907.650,00	3.907.650,00	100,00				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.259.700,00	32.105.422,00	96,53				
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.224.728.093,00	2.977.256.328,00	92,33				
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.133.129.793,00	2.888.420.650,00	92,19				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	91.598.300,00	88.835.678,00	96,98				
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.742.020,00	15.234.500,00	85,87				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.742.020,00	15.234.500,00	85,87				
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.230.250,00	82.454.534,00	80,66				

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.592.250,00	15.232.058,00	86,58		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.638.000,00	67.222.476,00	79,42	Terdapat sisa Anggaran dari Belanja Kontribusi Bimtek	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.767.600,00	326.588.561,00	96,12		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.721.000,00	3.906.000,00	68,27	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.380.000,00	3.285.600,00	97,21		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.951.000,00	7.011.000,00	88,18	Terdapat sisa anggaran dari hasil negosiasi pada proses e-Katalog	Menggunakan data pasar terkini sebagai referensi harga sebelum menetapkan anggaran awal untuk menghindari perbedaan besar antara anggaran dan harga negosiasi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.660.000,00	4.060.000,00	38,09		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.015.600,00	280.385.961,00	98,72		
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.095.580.500,00	10.713.445.569,00	96,56		
	Pengadaan mebel	44.000.000,00	43.528.100,00	98,93		
	Pengadaan Kendaraan dinas	967.930.500,00	958.626.347,00	99,04		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.650.000,00	194.310.805,00	97,33		
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	9.860.000.000,00	9.493.226.317,00	96,28		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	23.754.000,00	98,98		
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.973.200,00	150.870.304,00	92,01		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.553.200,00	12.865.586,00	94,93		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.260.000,00	63.454.718,00	90,31		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.160.000,00	74.550.000,00	93,00		
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.550.000,00	109.040.447,00	93,56		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.750.000,00	41.293.447,00	98,91		

Laporan Kinerja | 2025

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.150.000,00	16.335.000,00	73,75		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.650.000,00	51.412.000,00	97,65		
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	62.126.600,00	53.730.586,00	86,49		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	62.126.600,00	53.730.586,00	86,49		
1.	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	62.126.600,00	53.730.586,00	86,49		Akan Menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistik sesuai kebutuhan
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	101.406.100,00	89.351.342,00	88,11		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	101.406.100,00	89.351.342,00	88,11		
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	16.942.400,00	6.934.400,00	40,93		
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	84.463.700,00	82.416.942,00	97,58		
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	253.960.250,00	236.296.998,00	93,04		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	253.960.250,00	236.296.998,00	93,04		
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	240.798.050,00	225.556.284,00	93,67		
2.	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko	13.162.200,00	10.740.714,00	81,60		
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	197.955.400,00	184.865.389,00	93,39		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	197.955.400,00	184.865.389,00	93,39		
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	53.161.750,00	48.346.123,00	90,94		
2.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	75.727.950,00	73.185.877,00	96,64		
3.	Pengawasan Penanaman Modal	69.065.700,00	63.333.389,00	91,70		
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	17.258.000,00	17.042.108,00	98,75		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.258.000,00	17.042.108,00	98,75		

1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.258.000,00	17.042.108,00	98,75		
TOTAL BELANJA		15.760.068.813,00	15.019.297.813,00	95,30		

Laporan Kinerja | 2025

**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
TRIWULAN IV
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)			
				I		II		III		IV						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10=12/7x100%						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	95	15.127.362.463	20	729.642.092	45	1.898.881.913	75	896.720.092	90	10.912.767.293	90	14.438.011.390	94,74%	95,44%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	66.790.800	25	7.140.000	25	11.347.500	25	16.218.000	-	28.415.647	75	63.121.147	75,00%	94,51%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	3	26.185.900	1	2.900.000	1	6.440.000	1	3.636.000	-	11.832.099	3	24.808.099	100,00%	94,74%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	3.437.550	1	-	1	-	-	-	-	2.299.976	2	2.299.976	100,00%	66,91%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	3.907.650	-	-	2	3.907.650	-	-	-	-	2	3.907.650	100,00%	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	33.259.700	2	4.240.000	2	999.850	3	12.582.000	3	14.283.572	10	32.105.422	100,00%	96,53%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Realisasi Anggaran (%)	100	3.224.728.093	25	621.853.123	25	856.501.030	25	515.706.593	-	983.195.582	75	2.977.256.328	75,00%	92,33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	3.133.129.793	20	614.153.123	20	835.592.530	20	501.216.593	48	937.458.404	108	2.888.420.650	100,00%	92,19%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	91.598.300	3	7.700.000	7	20.908.500	3	14.490.000	5	45.737.178	18	88.835.678	100,00%	96,98%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Aset Teradministrasi (%)	100	17.742.020	25	1.900.000	25	2.850.000	25	2.850.000	-	7.634.500	75	15.234.500	75,00%	85,87%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	17.742.020	1	1.900.000	1	2.850.000	1	2.850.000	1	7.634.500	4	15.234.500	100,00%	85,87%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100	102.230.250	25	-	25	9.159.000	25	4.465.000	-	68.830.534	75	82.454.534	75,00%	80,66%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	17.592.250	3	-	3	-	3	-	3	15.232.058	12	15.232.058	100,00%	86,58%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	84.638.000	-	-	3	9.159.000	2	4.465.000	10	53.598.476	15	67.222.476	100,00%	79,42%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100	339.767.600	25	73.307.435	25	42.222.452	25	28.925.522	-	182.133.152	75	326.588.561	75,00%	96,12%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.721.000	1	-	1	-	1	-	1	3.906.000	4	3.906.000	100,00%	68,27%

Laporan Kinerja | 2025

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.380.000	-	-	-	-	1	3.285.600	-	-	1	3.285.600	100,00%	97,21%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	7.951.000	1	-	1	-	-	840.000	1	6.171.000	3	7.011.000	100,00%	88,18%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	10.660.000	1	1.500.000	1	1.710.000	1	-	1	850.000	4	4.060.000	100,00%	38,09%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	8.040.000	15	2.010.000	15	2.010.000	15	2.010.000	15	2.010.000	60	8.040.000	100,00%	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000	3	-	3	6.650.000	3	2.000.000	3	11.250.000	12	19.900.000	100,00%	99,50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270	284.015.600	35	69.797.435	52	31.852.452	35	20.789.922	200	157.946.152	322	280.385.961	100,00%	98,72%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100	11.095.580.500	-	-	-	927.180.000	100	257.691.152	-	9.528.574.417	100	10.713.445.569	100,00%	96,56%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	967.930.500	-	-	2	927.180.000	-	31.446.347	-	-	2	958.626.347	100,00%	99,04%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	13	44.000.000	-	-	-	-	-	-	13	43.528.100	13	43.528.100	100,00%	98,93%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	199.650.000	-	-	-	-	16	189.315.805	-	4.995.000	16	194.310.805	100,00%	97,33%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	9.860.000.000	-	-	-	-	-	13.175.000	1	9.480.051.317	1	9.493.226.317	100,00%	96,28%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	4	24.000.000	-	-	-	-	23.754.000	4	-	4	23.754.000	100,00%	98,98%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100	163.973.200	25	23.641.534	25	36.526.931	25	39.327.957	-	51.373.882	75	150.870.304	75,00%	92,01%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	13.553.200	1	2.000.000	1	3.000.000	1	1.000.000	1	6.865.586	4	12.865.586	100,00%	94,93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	70.260.000	3	12.141.534	3	15.526.931	3	16.247.957	3	19.538.296	12	63.454.718	100,00%	90,31%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	80.160.000	5	9.500.000	5	18.000.000	5	22.080.000	5	24.970.000	5	74.550.000	100,00%	93,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100	116.550.000	25	1.800.000	25	13.095.000	25	31.535.868	-	62.609.579	75	109.040.447	75,00%	93,56%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	41.750.000	2	-	1	13.095.000	-	23.595.868	7	4.602.579	10	41.293.447	100,00%	98,91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	47	22.150.000	4	1.800.000	8	-	12	7.940.000	23	6.595.000	47	16.335.000	100,00%	73,75%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	52.650.000	-	-	-	-	-	-	1	51.412.000	1	51.412.000	100,00%	97,65%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,44%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Laporan Kinerja | 2025

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	90	62.126.600	-	4.260.000	-	20.807.000	-	27.877.817	92	785.769	92	53.730.586	102,00%	86,49%	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi (%)	100	62.126.600	25	4.260.000	25	20.807.000	25	27.877.817	-	785.769	75	53.730.586	75,00%	86,49%	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2	62.126.600	-	4.260.000	2	20.807.000	-	27.877.817	-	785.769	2	53.730.586	100,00%	86,49%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	86,49%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	101.406.100	-	11.357.600	-	16.198.900	58	17.468.049	90	44.326.793	90	89.351.342	90,00%	88,11%	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Persentase)	100	101.406.100	-	11.357.600	50	16.198.900	75	17.468.049	-	44.326.793	125	89.351.342	125,00%	88,11%	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	84.463.700	1	11.357.600	-	9.264.500	1	17.468.049	-	44.326.793	2	82.416.942	100,00%	97,58%	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2	16.942.400	-	-	-	6.934.400	1	-	1	-	2	6.934.400	100,00%	40,93%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	88,11%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (Persentase)	95	253.960.250	-	35.942.500	-	70.398.000	-	40.573.658	-	92.740.590	91	239.654.748	95,79%	94,37%	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan (%)	100	253.960.250	25	35.942.500	25	70.398.000	25	40.573.658	-	92.740.590	75	239.654.748	75,00%	94,37%	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2000	240.798.050	733	35.942.500	829	69.828.000	1.309	40.292.944	577	82.850.590	3.448	228.914.034	100,00%	95,06%	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	25	13.162.200	8	-	9	570.000	27	280.714	-	9.890.000	44	10.740.714	100,00%	81,60%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	94,37%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	197.955.400	-	15.680.000	-	20.400.000	80	20.434.192	87	128.351.197	87	184.865.389	87,00%	93,39%	

Laporan Kinerja | 2025

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase pengawasan, Pengendalian dan penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal (Percentase)	85	197.955.400	-	15.680.000	25	20.400.000	50	20.434.192	-	128.351.197	75	184.865.389	88,24%	93,39%
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	53.161.750	2	1.560.000	-	9.230.000	2	14.846.184	4	22.709.939	8	48.346.123	100,00%	90,94%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	160	75.727.950	-	-	-	-	80	-	80	73.185.877	160	73.185.877	100,00%	96,64%
	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	15	69.065.700	1	14.120.000	2	11.170.000	3	5.588.008	6	32.455.381	12	63.333.389	80,00%	91,70%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	93,02%	93,39%
														Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	75	17.258.000	-	-	-	570.000	35	7.804.908	40	8.667.200	40	17.042.108	53,33%	98,75%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Dokumen)	2	17.258.000	-	-	1	570.000	-	7.804.908	-	8.667.200	1	17.042.108	50,00%	98,75%	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2	17.258.000	-	-	1	570.000	-	7.804.908	1	8.667.200	2	17.042.108	100,00%	98,75%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	98,75%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				15.760.068.813	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,91%	95,32%	
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi Kinerja Tw.3 Tahun 2025 di tuangkan dalam matris tindak lanjut sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Pimpinan Instansi segera menerbitkan instruksi tertulis yg mewajibkan seluruh pejabat penilai kinerja (atasan langsung) dan ASN yang dinilai untuk segera menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja dan atau SKP	Telah melakukan dan mensusun Perjanjian Kinerja perubahan dan SKP pada masing-masing pegawai.	Telah membuat dan mengupload Perjanjian Kinerja dan SKP Tahun 2025.
2.	Pastikan setiap ASN memahami sasaran kinerja individu yang selaras dengan tujuan organisasi. Sasaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu (SMART goals)	Telah melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja dengan rapat internal yang melibatkan semua pegawai pada lingkup DPMPTSP.	Telah melakukan evaluasi berjenjang
3.	Agar Membuat laporan Kinerja Triwulan	Telah menyusun Laporan Kinerja Triwulan	Telah dibuat dan diupload pada aplikasi SAKIP Sipengendali
4.	Kepala perangkat daerah wajib menyelenggarakan evaluasi internal atas pencapaian kinerja diseluruh level jabatan.	Telah dilakukan Evaluasi RKPD pertriwulan di Bapperida	Telah maleporkan realisasi kinerja dan keuangan pada evaluasi RKPD triwulan.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025 - 2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis 1 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 Realisasi Investasi sebesar **Rp 4.219.139.934.687,-** atau sebesar **127,85%**, dan sasaran strategis 2 Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan **88,86 atau sebesar 101,14 %**
- b. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :
 - Telah melakukan koordinasi secara lisan dengan Bapelitbangda dalam hal penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja dan sop pengumpulan data kinerja dan Bapelitbangda akan mengkoordinir penyusunan pedoman tersebut dengan melakukan pertemuan untuk semua OPD.
 - Telah melakukan perbaikan dan melengkapi perencanaan kinerja dengan jadwal monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada KAK/TOR Sub kegiatan.
 - Terkait pemberian reward and Punishment, untuk saat ini masih berdasarkan presensi, belum ada tindak lanjut dalam bentuk lainnya.
 - Telah dilakukan pencantuman rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.
 - Telah melakukan Evaluasi Internal dengan menggunakan aplikasi dapat dilihat pada aplikasi Sipengendali Pede dan E-Sakip Luwu Timur.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPMPTSP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 31 Januari 2026

Pj. KEPALA DINAS,



L

A

M

P

I

R

A

N

RAPAT EVALUASI TW.1 Tahun 2025

Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Senin, 14 April 2025 Pukul 10.00 WITA



RAPAT EVALUASI TW.3 Tahun 2025

Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Senin, 6 Oktober 2025 Pukul 10.00 WITA



RAPAT EVALUASI TW.4 Tahun 2025

Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jumat, 09 Januari 2026 Pukul 09.00 WITA

